

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 23 DAN 30 NOVEMBER 2021



TENTANG RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
3. Skors (untuk penyusunan Pandangan Umum Fraksi);
4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
5. Skors (untuk penyusunan Jawaban Bupati);

6. Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. Supadi**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
2. Jabatan : **Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat : Saudara Bupati dan Wakil Bupati
Rembang
- Yang terhormat : Pimpinan dan segenap anggota DPRD
Kabupaten Rembang
- Dan yang kami hormati : TAPD Kabupaten Rembang , serta Plt.
Sekretaris DPRD beserta staf.

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021, kita dapat berkumpul untuk mengikuti Rapat Paripurna Pertama dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 34 orang.

Keabsahan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menjelaskan bahwa “ *Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD* ”.

Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna Pertama dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 13.10 WIB rapat paripurna saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sangat erat hubungannya dengan RKPD Tahun 2022 serta KUA-PPAS Tahun 2022, dengan berpedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Noenkatur Perencanaan Pebangunan Dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan,
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini adalah tindak lanjut disampaikannya surat Bupati Rembang, nomor : 188.3/2611/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Berita Daerah Pengiriman Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD, serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 22 November 2021.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
3. Skors (untuk penyusunan Pandangan Umum Fraksi);

4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
5. Skors (untuk penyusunan Jawaban Bupati);
6. Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua dalam rapat paripurna hari ini yaitu Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA APBD 2022 ==

Terima kasih Saudara H. Abdul Hafidz, SPdi atas penjelasannya.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Dari penjelasan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Fraksi-Fraksi dengan pandangan umumnya. Atas hal tersebut, perlu kita berikan waktu kepada Fraksi-Fraksi dalam menyusun pandangan umumnya. Untuk itu, rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu untuk menyusun pandangan umum Fraksi telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita teruskan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara yang keempat, yaitu Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdri. Siti Rizqiyah PDA
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Nasirudin, S.Si.
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Mashadi,S.Pd.,M.M.
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Adi Purwoto
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. H. Gunasih, S.E.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Rabis Swabihantoro

Selanjutnya, secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI =====

- *(Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya. Dari pandangan umum Fraksi-Fraksi ini, selanjutnya akan ditanggapi oleh Bupati dengan jawaban Bupati. Untuk keperluan penyusunan jawaban, maka rapat paripurna saya skors kembali selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara keenam yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

==== JAWABAN BUPATI ====

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

- *(Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*" tepat pukul 15.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wabillahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. SUPADI

Plt.SEKRETARIS,
Kepala Badan Kesbangpol



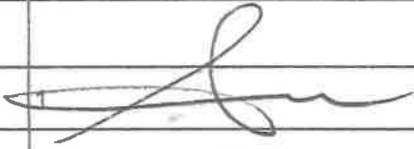
Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Sekda Rembang dan TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN III : Pandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022.

**RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**HARI/TANGGAL : SELASA, 23 NOVEMBER 2021
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD		✓
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	✓
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27 ✓
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**HARI/TANGGAL : SELASA, 23 NOVEMBER 2021
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekretaris Daerah	3. 

Ptt. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Rembang


Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009



**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

HARI/TANGGAL : SELASA, 23 NOVEMBER 2021

PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Asisten I Sekda	1
2		Asisten II Sekda	2
3	H. WALUYO	Asisten III Sekda	3
4		Ka. BPPKAD	4
5	Dedy	an Ka. BAPPEDA	5
6		Kabag. Hukum Setda	6
7	Wahyudin	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	7
8	NURPURNOMO	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

PII SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Rembang



[Signature]

Drs. BRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N

R A N C A N G A N P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G
A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H
K A B U P A T E N R E M B A N G



T A H U N A N G G A R A N
2 0 2 2

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah beserta TAPD Kabupaten Rembang

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Rancangan APBD TA 2022 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dengan mendasari skala prioritas pembangunan, hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun APBD Tahun 2022 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan kinerja pembangunan yang telah dicapai sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan APBD khususnya yang berkaitan dengan upaya pemulihan kondisi akibat Covid-19 serta

penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Desa/Kelurahan hingga Kabupaten. Selain itu APBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan yang terjadi berupa dampak sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga kebijakan, strategi serta program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2022 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran dengan tema **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien"**.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Tujuan utama Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah pelaksanaan program prioritas sebagai berikut :

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing;
3. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan ketersediaan air baku;
5. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
6. Peningkatan Kemandirian Desa; dan
7. Penurunan Ancaman Krisis akibat Perubahan Iklim dan Penyakit Menular (*Wabah, Epidemic, dan Pandemic*).

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan dan Pengendalian Covid-19
2. Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Pelayanan dan pendukung kesehatan
5. Pembangunan jalan dan jembatan
6. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik
7. RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah
8. Rehabilitasi jaringan irigasi
9. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat
10. Penataan lingkungan permukiman
11. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani
12. Pengelolaan persampahan
13. Pengelolaan TPI terpadu
14. Penyediaan sarana distribusi perdagangan
15. Penyediaan sarana usaha mikro dan menengah
16. Pengembangan destinasi pariwisata
17. Program Keluarga Berencana

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.:

Struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Terkait alokasi Pendapatan Transfer, kami merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, disebutkan :

“ Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan maka dasar pencantuman alokasi pendapatan TKDD mendasarkan pada informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah diinformasikan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S.170/PK/2021 tertanggal 1 oktober 2021, Perihal Penyampaian Rincian TKDD Tahun Anggaran 2022 ”.

Esensi Pendapatan TKDD berpengaruh terhadap penyesuaian Pendapatan Daerah yang berimbas pada struktur Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sehingga terdapat perbedaan antara dokumen KUA-PPAS Tahun 2022 dengan RAPBD 2022.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.874.516.280.000,- Jumlah ini naik 6.14% dari target pendapatan daerah pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp. 1.766.048.467.000,00

sebesar Rp. 1.874.516.280.000,- terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 373.771.127.000,-
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.495.745.153.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 5.000.000.000,-

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial pascapandemi COVID-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak pandemi.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 ini Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah sebesar Rp. 2.189.938.582.051,- yang terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp. 1.332.544.594.820,-
➤ Belanja Modal	Rp. 436.713.732.231,-
➤ Belanja Tidak Terduga	Rp. 6.100.000.000,-
➤ Belanja Transfer	Rp. 414.580.255.000,-

digunakan untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Rembang.

3. Pembiayaan Daerah :

Penerimaan pembiayaan dalam RAPBD TA 2022 sebesar
Rp. 372.290.670.051,-

Pengeluaran pembiayaan dalam RAPBD TA 2022 sebesar
Rp. 56.868.368.000,-

Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA tentang
APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 :

Uraian	RAPBD 2022
PENDAPATAN DAERAH	1.874.516.280.000
Pendapatan Asli Daerah	373.771.127.000
Pajak Daerah	122.505.000.000
Retribusi Daerah	32.374.500.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.250.000.000
Lain - lain PAD yang Sah	199.641.627.000
Pendapatan Transfer	1.495.745.153.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.373.545.153.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.200.000.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000
Pendapatan Hibah	5.000.000.000
BELANJA	2.189.938.582.051
Belanja Operasi	1.332.544.594.820
Belanja Pegawai	771.736.258.703
Belanja Barang dan Jasa	375.080.967.852
Belanja Hibah	180.744.596.265
Belanja Bantuan Sosial	4.982.772.000
Belanja Modal	436.713.732.231
Belanja Modal Tanah	128.602.300.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.639.850.631
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.261.264.600
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	164.725.997.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.320.000
Belanja Tidak Terduga	6.100.000.000
Belanja Tidak Terduga	6.100.000.000

	414.580.255.000
Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil	10.391.229.000
Belanja Bantuan Keuangan	404.189.026.000
SURPLUS / (DEFISIT)	(315.422.302.051)
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	372.290.670.051
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	122.290.670.051
Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	56.868.368.000,00
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000
PEMBIAYAAN NETTO	315.422.302.051
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Uraian	RAPBD 2022
	414.580.255.000
Belanja Transfer	10.391.229.000
Belanja Bagi Hasil	404.189.026.000
Belanja Bantuan Keuangan	
SURPLUS / (DEFISIT)	(315.422.302.051)
PEMBIAYAAN	
	372.290.670.051
Penerimaan Pembiayaan	122.290.670.051
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	56.868.368.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	53.868.368.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
PEMBIAYAAN NETTO	315.422.302.051
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, terhadap hal-hal yang belum jelas, tentunya akan disampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Rembang terhadap RAPBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2022 lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran. Saya berharap untuk segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 15 November 2021

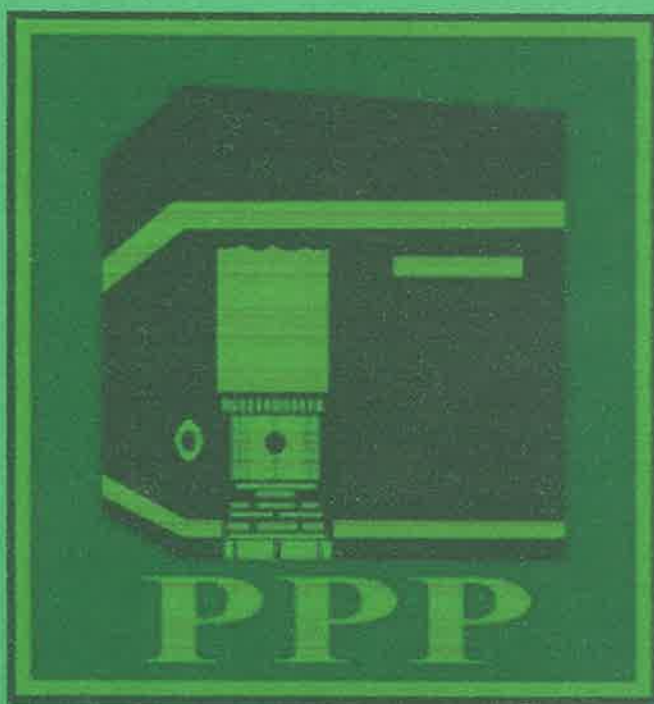


PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN REMBANG**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari: Selasa , 23 Nopember 2021

Dibacakan oleh : H. SUNARDI, SPd.I

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

R E M B A N G

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN REMBANG

Selasa , 23 Nopember 2021

Dibacakan oleh : H. SUNARDI ,SPd.I

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah , asholatu wassalamu a'la Rosulillah , Wa'ala alihi wasohbihi
wamawwalah , Laa haula walaa quwwata illa billah.. , Amma ba'da ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris daerah , Staf Ahli Bupati , Asisten Sekda , dan para Kepala OPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan...

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan menyampaikan pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW., yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai yaumul qiyamah.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati , serta Sidang Dewan yang kami hormati...,

Mengawali penyampaian pandangan umum ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang , yang selalu harus tetap bekerja keras , untuk menyelesaikan kegiatan APBD tahun 2021 , dengan sisa waktu efektif yang tinggal 37 hari lagi harus berahir . Dan khususnya kepada TAPD, kami juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan, untuk segera dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang terhormat.....,

Selanjutnya, setelah mendengarkan paparan penjelasan sdr. Bupati , tentang Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2022 pada rapat Paripurna I hari ini , Selasa tanggal 23 Nopember 2021 beberapa saat yang lalu , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , pada kesempatan yang baik dalam Pemandangan Umum Fraksi ini , menyampaikan beberapa catatan sebagai masukan dan pertimbangan pada pembahasannya , antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan penganggaran dalam RAPBD Tahun 2022 , yang mana cakupan yang tertera dalam tujuan utama Rancangan Pelaksanaan program Prioritas , ada 7 (tujuh) Program , dan terdiri dari 17 prioritas Kegiatan , dengan total Belanja daerah di dalam RAPBD Th. 2022 sejumlah Rp. 2.198.938.528.051,00 .

Untuk Jumlah Pendapatan Daerah , di dalam KUA Th. 2022 diproyeksikan sebesar : Rp. 1.712.082.339.500,00 , dan yang tertulis di dalam RAPBD Tahun 2022 sebesar : Rp. 1.874.516.280.000,00 , menurut kami terjadi perbedaan selisih yang cukup signifikan , yaitu sebesar Rp. 162.433.840.500,00 , Mohon penjelasannya.

2. Terkait dengan prediksi atau pemasangan jumlah besaran angka SILPA , yaitu sebesar Rp. 122.290.670.051,00 , atau sebesar hampir 6 % terhadap jumlah nilai RAPBD, menurut kami nilai Silpa tersebut terlalu besar . Kami usulkan mohon di dalam pembahasan bisa dikurangi atau diperkecil .
3. Terkait dengan pos Item Penerimaan Pembiayaan , bahwa di dalamnya terdapat Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,00 ,

Mohon penjelasan tentang dana pinjaman dimaksud , dimana mengajukan Pinjamanya dan bagaimana prosesnya .

4. Di dalam postur anggaran , pada pos item Pengeluaran Pembiayaan , terdapat sub item Penyertaan Modal Daerah , sebesar Rp. 3.000.000.000,- , kepada siapa penyertaan modal tersebut diberikan ... ? mohon penjelasan...!
5. Terkait dengan pelayanan masyarakat , yang menyangkut kebutuhan sarana bidang Pendidikan , bidang Kesehatan , sarana jalan antar desa atau antar kecamatan yang masih tidak layak , dan kebutuhan sarana air bersih diwaktu musim kemarau , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan , agar kebutuhan sarana tersebut mohon kebutuhan anggaranya dicukupi , supaya tidak menjadi problem tahunan bagi masyarakat.

Demikian Pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 , untuk selanjutnya mohon tanggapan dari sdr. Bupati , dan kemudian segera dilakukan pembahasan oleh BANGGAR bersama dengan TAPD dan dengan pihak-pihak terkait.

Trima kasih atas segala perhatian , dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya...

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh....

Rembang , 23 Nopember 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

MOCH. MUNTOHID , SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI , SPd.I



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pandangan Umum

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS**

RAPERDA APBD TA. 2022

Disampaikan oleh :.....
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Selasa, 23 November 2021

Assalamu 'alaikumwb.wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami Hormati, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat dilingkungan Pemkab Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, terlebih Dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang *Atas Raperda APBD TA. 2022* dalam Keadaan Sehat Wal afiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amiin !!

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya FPKB mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Tentu kami, **FPKB** menyetujui apabila Raperda ini segera di bahas melalui mekanisme rapat-rapat berikutnya di DPRD sehingga nanti APBD 2022 sebagai pedoman pemkab dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa ditetapkan pada waktu yang seharusnya sebagaimana amanat perundang-undangan.

Hadirin siding paripurna yang terhormat,

Kami juga memberikan apresiasi atas semangat dan niat baik Pemkab Rembang dalam merancang APBD 2022 dengan 7 (tujuh) program-program prioritas yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat sebagaimana di jelaskan dalam pengantar Nota Keuangan Raperda APBD 2022. Namun perkenankan kami memberikan catatan-catatan sebagaimana berikut :

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Pada RAPBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan ebesar Rp. 1.874.516.280.000,- dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.

373.771.127.000,- Pendapatan Transfer 1.495.745.153.000,- dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 5.000.000.000,-. Setelah kami Sandingkan dengan KUA-PPAS 2022 yang diproyeksikan Pendapatan Transfer SebesarRp. 1.250.571.892.500,- dan lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 69.380.820.000,- yang artinya ada selisih tambah kurang lebih Rp. 245 Milyar pada Pendapatan Transfer dan selisih kurang Rp. 64 Milyar pada lain-lain pendapatan Daerah yang Sah. Terhadap selisih-selisih angka yang cukup besar ini kami mohon diberi penjelasan..

BELANJA DAERAH

Sebagai konsekwensi dari Kenaikan proyeksi pendapatan Daerah tentu di ikuti dengan kenaikan proyeksi Belanja. FPKB mohon penjelasan lebih detail terkait perencanaan belanja yang didanai oleh Kenaikan proyeksi pendapatan Daerah.

PEMBIAYAAN

Pada RAPBD 2022 direncanakan Pembiayaan yang bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200 Milyar. FPKB mohon penjelasan sejauh mana urgensi pinjaman tersebut, apakah sudah dipertimbangkan secara menyeluruh resiko-resiko yang mungkin dihadapi dan bagaimana Pemkab mengalkulasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini penting agar pinjaman Daerah tersebut tidak menjadi beban berat bagi Pemkab dikemudian hari.

Hadirin siding paripurna yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKB, Selanjutnya FPKB menyatakan **MENERIMA** Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut agar diperoleh RAPBD yang lebih bertanggungjawab dan diterima oleh semua pemangku kepentingan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya,

Wallahumuwaaffiqilaaqwamitthoriq

WassalamualaikumWr. Wb

Rembang, 23 November 2021

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

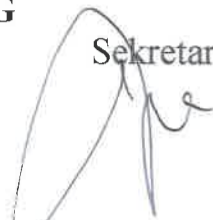
Ketua



ILYAS



Sekretaris



Nasirudin, S.Si



PANDANGAN UMUM

FRAKSI NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2022



**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Dewan Kabupaten Rembang;

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian **"Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022"** dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari Fraksi NasDem menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Kami berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD Tahun 2022 dapat tercapai dan tidak menumpuk diakhir tahun.
2. Mengenai penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,- pinjaman tersebut darimana?
Dibayar dalam jangka waktu berapa tahun?
Bagaimana sistem pembayarannya?
Mohon Penjelasan.
3. Kami mendukung program pembangunan jalan dan jembatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Mohon program ini untuk dilaksanakan dengan baik karena di Kabupaten Rembang banyak jalan yang sudah rusak lama akan tetapi belum dibangun.
4. Mohon untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk.
5. Mohon agar Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dapat menaikkan insentif bagi para guru madrasah diniyah yang selama ini dinilai masih sangat minim.
6. Berkaitan dengan beberapa persoalan di pasar Rembang mohon untuk diperhatikan. Mohon untuk mengatur ketertiban dan keamanan pasar dengan baik. Mohon jangan menaikkan retribusi pasar di masa pandemi karena pedagang pasar merasa keberatan. Berkaitan dengan pembangunan pasar Rembang, mohon untuk dalam pengambilan keputusan mengenai lokasi pembangunan pasar apakah tetap atau pindah harus mendapat persetujuan pedagang pasar.
7. Untuk BPJS yang dinonaktifkan mohon segera diaktifkan kembali dan program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang berakhir mohon segera dianggarkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
8. Mohon untuk mengoptimalkan program pengelolaan sampah di daerah pemukiman nelayan.

9. Kami berharap rancangan peraturan daerah ini akan menjadi peraturan daerah yang dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi yang ada.
10. Kami berharap penggunaan APBD Tahun 2022 agar mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, berkeadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran target khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19.

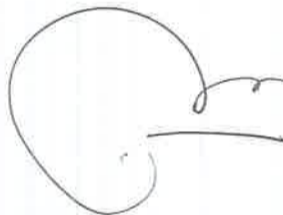
Demikian pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 November 2021
**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

Sekretaris



H. MASHADI, S.Pd., M.M.



FRIDA IRIANI



PDI PERJUANGAN

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pada Tanggal : 23 NOVEMBER 2021**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212
Telp. : (0295)6911494



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang terhormat. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,
Yang terhormat. Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,
Yang terhormat. Sekretaris Daerah dan seluruh Jajaran Eksekutif,
dan Seluruh Anggota Dewan, beserta Seluruh Hadirin Yang Kami Muliakan.

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Om Swasti astu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu,

MERDEKA!

Mengawali Pandangan Umum Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Pimpinan Rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi.
2. Saudara Bupati yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyusun dan menyampaikan raperda tersebut.

Menanggapi Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, kami fraksi PDI Perjuangan **menyetujui** Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap berikutnya, dengan catatan :

- Kami berharap adanya penambahan dana BTT (Belanja Tidak Terduga), untuk berjaga-jaga jika ada peningkatan situasi pandemi dikemudian hari. Akan tetapi, jika situasi pandemi nantinya semakin terkendali, dana BTT (Belanja Tidak Terduga) dapat digunakan untuk memaksimalkan program-program lain yang menjadi prioritas.
- Kami berharap didalam tahap pembahasan berikutnya, Badan Anggaran dapat membahas lebih mendalam, obyektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.

Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlidungan untuk kita semua. Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....


**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua


JASMANI



Sekretaris


WIDODO, SH

**PANDANGAN UMM FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022**



**FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG
SELASA, 23 NOVEMBER 2021
DIBACAKAN OLEH :H. GUNASIH S.E**

**PANDANGAN UMM FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022**



**FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG
SELASA, 23 NOVEMBER 2021
DIBACAKAN OLEH :H. GUNASIH S.E**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT-HANURA

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT – HANURA

TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

SELASA, 23 NOVEMBER 2021

DIBACAKAN OLEH :H. GUNASIH S.E

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita Semua

Yang Kami Hormati

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekertaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekertaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di lingkungan Pemerintah Kab.Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan fraksi ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan keselamatan limpahan Rahmat Hidayahnya Kenikmatan Lahir dan Batin sehingga kita dapat mengikuti PariPurna Ini tanpa kekurangan apapun.

Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam pembahasan Raperda Tahun Anggaran 2022 ini yang baru saja di sampaikan Saudara Bupati Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati. Dalam hal ini ada beberapa tanggapan yang kami sampaikan antara lain:

1. Kami Fraksi Demokrat – Hanura berharap supaya mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sector karena aktivitas perekonomian sudah normal kembali
2. Fraksi Demokrat – Hanura Berharap Supaya Belanja tak terduga di anggarkan Lebih banyak lagi kisaran 10 M untuk mengantisipasi Covid sehingga tidak ada lagi refocusing.
3. Fraksi Demokrat Hanura Memberikan Rapot Merah terkait kinerja OPD-OPD karena kami melihat kinerjanya sangat lamban dan juga catatan merah buat kegiatan fisik yang begitu menghawatirkan disisi perencanaan dan pelaksanaan.
4. Kami Fraksi Demokrat – Hanura Menyoroti Rencana Program Rehap Ringan, Sedang, Sampai dengan 2022, kami melihat bangunan fisik masih sangat bagus dan belum perlu rehap. Oleh karena itu jangan terlampau banyak yang di rehap.
5. Fraksi Demokrat Hanura berharap supaya Pemerintah Kabupaten Rembang perlu memperbanyak pelatihan – pelatihan kerja dalam mengentaskan pengangguran yang tiap tahun semakin bertambah.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokrat – Hanura ini Kami Sampaikan
Semoga Raperda ini bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Rembang yang
kita cintai ini.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf,

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 November 2021

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



MUGIARTO S.T

SEKRETARIS



DUMADIYONO, S.H.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap
Penjelasan Bupati tentang Rancangan Perda
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Selasa, 23 Nopember 2021
Juru Bicara: RABIS SWABIHANTORO

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan TAPD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Tak lupa mengingatkan bahwa kita masih dalam suasana covid_19 maka marilah kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan agar mengurangi penyebaran dari covid_19.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Meskipun sudah terlewat 2 pekan yang lalu, perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan, Pahlawanku Inspirasiku. Semoga Semangat dan pengorbanannya memberikan inspirasi bagi seluruh generasi. Dan menambah motivasi, untuk berKarya bagi seluruh negeri sehingga Indonesia menjadi Sejahtera

Dan Selamat Hari Guru Nasional 25 Nopember 2021, Semoga semangat juangmu menggerakkan hati untuk memulihkan pendidikan anak negeri.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Mendengar penjelasan tentang Raperda APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Sdr. Bupati.

Fraksi KIS sangat mengapresiasi atas segala daya upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab dalam meningkatkan laju pembangunan terutama selama masa pandemi. Ini benar-benar membanggakan hingga Rembang masuk level 2 dan mudah2an ke depan bisa masuk ke level 1.

Pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik. Daya beli mulai merangkak naik. Pasar mulai ramai. Para bakul dan pembeli terlihat sumringah. Menandakan kehidupan tampak mulai normal kembali.

Ini hasil yang harus disyukuri dan harus terus ditingkatkan.

Namun demikian, Terdapat beberapa hal yang kami mintakan penjelasan dan harapan kepada pemerintah antara lain :

1. Fraksi KIS juga mengingatkan Pemkab bahwa sesungguhnya hasil pembangunan tidak hanya dilihat dari proses perencanaan dan tata kelola pelaksanaan, tapi hal lebih penting adalah hasil akhir (outcome) dan dampak (impact) pembangunan harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat banyak , tidak untuk kelompok atau golongan tertentu saja, yakni meningkatnya tingkat kesejahteraan. Ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan keterbelakangan. Meningkatnya daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
2. Disamping itu , pembangunan juga harus bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang belakangan ini dimungkinkan belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah.
3. Keluhan para petani dengan jatuhnya harga lombok, tomat, bawang merah, terong, dan beberapa hasil pertanian , menjadikan petani merugi. Adanya kebijakan yang membuat petani lega belum terlihat. Mohon penjelasan!

4. Keluhan sebagian masyarakat yang secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan, kartu BPJS nya tidak aktif , serta beberapa haknya atas BPNT dipotong , hendaknya disikapi secara lebih cermat oleh Pemkab. Mohon penjelasan!
5. Terkait dengan hutang, Fraksi KIS meminta Pemkab sejauh mungkin tidak hutang agar beban anggaran tidak semakin berat. Fraksi KIS mengarahkan agar Pemkab mengupayakan mengalihkan anggaran yang tidak prioritas untuk dialihkan ke program yang mendukung PEN pemerintah pusat.
6. Kondisi para petani yang merasakan bahwa biaya produksi yang tidak sebanding dengan hasil panen, luas lahan yang digarap dan hasilnya tidak disebanding dengan biaya hidup, hal ini yang membuat nasib petani dan tani rata-rata berada digaris kemiskinan. Faktor ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi problem tersendiri, kondisi tanah semakin miskin unsur hara karena efek dari pupuk kimia. Sudah seharusnya masyarakat kembali menggunakan pupuk organik agar tetap terjaga kesuburannya dalam jangka yang panjang. Adakah langkah-langkah dari Dinas Pertanian untuk mengatasi hal tersebut? Mohon penjelasan
7. Pembangunan Lasem kota pusaka sedang berlangsung saat ini, dan akan selesai di Tahun 2022 mendatang. Kami berharap adanya penataan infrastruktur yang baik dan memperhatikan nasib Pedagang kaki lima yang menjadi mata pencaharian kaum ekonomi lemah sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke kota Rembang. Karena program ini berasal dari Pemerintah pusat, maka Pemkab. Rembang harus bersinergi agar saling melengkapi. Program dan kegiatan apa saja yang akan dijadikan daya tarik agar wisatawan mau datang ke kota pusaka lasem? Mohon penjelasan
8. Kondisi jalan di Kabupaten Rembang disaat memasuki musim penghujan ini mulai mengalami kerusakan. Lubang jalan mulai muncul dimana-mana. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi

pemeliharaan jalan yang tepat guna, efektif dan efisien dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat. Teknologi perbaikan jalan aspal/ menutup jalan aspal dengan hotmix, bukan lapis penetras penetrasi dengan shand sheet menurut kami jauh lebih efektif untuk diterapkan agar jalan yang berlubang tidak semakin lebar karena tergenang air. Karena telah kita ketahui bersama bahwa musuhya aspal itu adalah air. Jadi kita harus menjaga jalan kita agar tidak tergenang air, baik itu memperbaiki saluran air disepanjang jalan maupun menutup lubang jalan tersebut. Bagaimana tanggapan Pemkab terkait dengan hal tersebut?

9. Konstruksi dan proyeksi anggaran hendaknya dibuat moderat dengan tetap memperhatikan pertumbuhan agar keseimbangan neraca terjaga. Ini sangat penting mengingat kondisi pandemi menyebabkan kondisi pasar masih fluktuatif. Pemkab harus benar2 cermat.
10. Pemkab harus benar2 disiplin atas prioritas pembangunan ; dahulukan dan penuhi kebutuhan wajib agar tidak terjadi kesulitan dalam belanja dan menyusun anggaran perubahan.
11. Pemkab harus benar2 siap dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat , jangan sampai dana pemerintah pusat sudah siap tapi Pemkab keponthal- ponthal menyiapkan anggaran pendampingannya. Mohon penjelasan!
12. Kenaikan retribusi pedagang di pasar kota hendaknya perlu dikaji ulang untuk sementara dikembalikan pada aturan lama (belum ada kenaikan) mengingat situasi masih pandemi, hingga nanti situasi pasar normal kembali. Mohon penjelasan !
13. Proses pemindahan Pasar Kota Rembang hendaknya tetap memperhatikan aspirasi para pedagang : dipindah ke tempat yang representatif, dengan tetap mengedepankan kepentingan kemajuan pembangunan wajah kota. Mohon penjelasan !

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menutup Pandangan Umum ini mari kita berdoa agar Pandemi Covid-19 ini segera selesai dan kita bisa bekerja seperti sedia kala.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

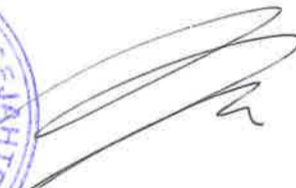
**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,

Sekretaris,



AGUS SUTRISNO



PUDI SANTOSA, S.P. M.H.



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	Dalam KUA Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah diproyeksi sebesar Rp. 1.712.082.339.500,00 dan yang tertulis dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.874.516.280.000,00 sehingga ada perbedaan selisih yang signifikan, mohon penjelasannya.	Kenaikan Pendapatan Daerah dari semula Rp. 1.712.082.339.500,00 menjadi sebesar Rp. 1.874.516.280.000,00 berdasarkan Surat dari Kemenkeu Nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan penyesuaian pendapatan TKDD , al. Penyesuaian DAU, DBH, DID, DD dan DAK Fisik maupun Non Fisik pada RAPBD TA. 2022
2.	Silpa sebesar Rp. 122.290.670.051,00 atau hampir 6 % dari jumlah nilai RAPBD mohon dikurangi pada saat pembahasan karena menurut kami terlalu besar.	Terima kasih atas saran dan masukannya terkait dengan penganggaran Silpa pada RAPBD Tahun Anggaran 2022
3.	Mohon penjelasan tentang Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,00, dimana pengajuan pinjaman dan bagaimana prosesnya?	Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 200.000.000.000,00 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengajukan persetujuan pinjaman daerah kepada DPRD dan telah disetujui 2. Sudah menyampaikan Surat kepada Bank Jateng tentang minat pinjaman dan pembayaran baik pokok utang dan bunga yang kompetitif 3. Pokok bunga dan pinjaman direncanakan dibayarkan pada tahun 2023 dan 2024
4.	Mohon Penjelasan terkait sub item Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,00, kepada siapa penyertaan modal tsb diberikan.	Penyertaan Modal diberikan kepada PDAM Rembang dan dana dimaksud bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat
5.	Pelayanan masyarakat yang menyangkut kebutuhan sarana bidang pendidikan, bidang kesehatan, sarana jalan tidak layak dan kebutuhan sarana air bersih diwaktu musim kemarau, kami mengusulkan agar kebutuhan sarana tsb dicukupi agar tidak menjadi problem tahunan bagi masyarakat.	Terimakasih , Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berupaya mencukupi kebutuhan tsb dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI PKB	
1.	Mohon diberi penjelasan terhadap selisih-selisih angka yang cukup besar.	Selisih dimaksud dapat dijelaskan dengan adanya kepastian TKDD tahun 2022 melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I Nomor : SE-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, yang jelas-jelas memberikan informasi bahwa Pendapatan Transfer mengalami perbedaan antara dokumen KUA 2022 yang masih menggunakan besaran tahun lalu, sedangkan pada Dokumen RAPBD telah menyesuaikan besaran sesuai dengan SE Menteri Keuangan.
2.	Kenaikan proyeksi pendapatan daerah agar diikuti dengan kenaikan proyeksi Belanja	Terima kasih, saran dan masukan telah kami laksanakan dalam penyusunan Raperda tentang APBD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
3.	Urgensi Pinjaman Daerah	<p>Pada RAPBD 2022 rencana melakukan pinjaman daerah, bahwa rangkaian pinjaman daerah telah dikaji dengan mempedomani Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembanguana strategis di Kabupaten Rembang yang direncanakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar ✓ Pengadaan Tanah untuk Embung ✓ Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan ✓ Pengadaa LPJU; ✓ Peningkatan dan Pelebaran jalan <p>Terkait kewajiban pembayaran pinjaman dan bunga dimaksud akan dibayarkan pada tahun 2023 s.d 2024.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>V. FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT</u>	
1.	Fraksi NasDem berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD Tahun 2022 dapat tercapai dan tidak menumpuk diakhir tahun.	1. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Nasional Demokrat atas penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 semoga kedepan hal-hal yang sudah diargetkan dalam RAPBD Tahun 2022 dapat tercapai.
2.	Mengenai pinjaman daerah sebesar Rp. 200.000.000,00. Mohon penjelasan.	2. Rencana Pinjaman daerah sebesar 200 juta dari BPD Jateng. Adapun sistem pembayaran direncanakan baik bunga dan pokok pinjaman akan dibayarkan pada tahun 2023 dan 2024 .
3.	Mohon agar program pembangunan jalan dan jembatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan baik.	3. Terima kasih atas masukannya akan kami perhatikan dan laksanakan dengan baik sesuai spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Mohon penjelasan untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk.	4. Kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Rembang disebabkan oleh distribusi yang terhambat. Dalam rapat dengan produsen pupuk PT. Pusri dan pupuk PT. Petro kimia Gresik dan semua distributor pupuk telah disepakati untuk pengiriman yang semula sehari 6 sampai 10 truk sekarang diusahakan minimal 12 sampai 24 truk. Dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Rembang.
5.	Mohon agar dapat menaikkan insentif bagi guru madrasah diniyah yang selama ini masih sangat minim.	5. Perlu kami sampaikan pada dalam penyampaian RAPBD Tahun 2022 honorarium bagi guru madrasah diniyah sudah ada kenaikan dari 300.000/orang/bulan menjadi 350.000/orang/bulan.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6.	Mohon penjelasan berkaitan persoalan di Pasar Rembang.	<p>6. Pemindahan Pasar Kota Rembang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang di Tahun 2022. Alasannya, pasca terjadinya kebakaran beberapa tahun silam, Pasar Kota Rembang belum pernah dilakukan pembangunan dan banyak fasilitas penunjang pasar yang tidak berfungsi. Selain itu jumlah pedagang Pasar Kota Rembang sudah melebihi kapasitas daya tampung sehingga pedagang meluber ke jalan. Akibatnya lalu lintas sekitar pasar menjadi tidak teratur. Pemkab Rembang memiliki aset tanah yang berada di sebelah barat Pasar Kota Rembang seluas 21.568 meter persegi yang rencananya dijadikan lokasi pemindahan pasar. Untuk rencana pemindahan pasar Pemkab akan lebih mengutamakan dialog dan diskusi kepada pedagang.</p>
7.	Mohon untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah pemukiman nelayan.	<p>7. Pengoptimalan Program Pengelolaan Sampah di daerah pemukiman nelayan yang telah dilakukan antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengurangan Sampah. Melalui sosialisasi pada masyarakat nelayan untuk membudayakan belanja dengan membawa tas belanja dari rumah selain itu digalakkan pendirian Bank Sampah untuk mewadahi sampah dan mengelola sampah an organic menjadi sumber pendapatan. • Program Penanganan Sampah Dengan mengalihkan/merubah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dari Konstruksi Permanen (Bak Tempat Sampah) mengganti dengan Kontainer Sampah serta meningkatkan Pelayanan Pengambilan Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat daerah nelayan.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN & NASDEM	
1.	Penambahan Belanja Tidak Terduga untuk berjaga-jaga jika ada peningkatan situasi pandemic dikemudian hari.	Terima kasih, penyediaan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga kami rasa sudah mencukupi,
2.	Dalam tahapan berikutnya Badan Anggaran dapat membahas lebih mendalam, obyektif dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Terima kasih, perihal pembahasan tersebut mencerminkan semangat untuk mengawal terhadap kualitas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	III. FRAKSI DEMOKRAT-HANURA	
1.	Agar mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sektor.	Terima kasih, saran dan masukan kami jadikan semangat dalam peningkatan pencapaian pendapatan daerah .
2.	Belanja Tidak Terduga agar dianggarkan lebih banyak lagi kisaran 10 milyar.	Penyediaan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga kami rasa sudah mencukupi, mengingat dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang juga membiayai program/kegiatan wajib dan mengikat.
3.	Rapor merah terkat kinerja OPD yang sangat lamban atas kegiatan fisik yang begitu menghawatirkan disisi perencanaan dan pelaksanaan.	Terkait dengan kondisi dimaksud, kami harap untuk dimaklumi atas keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pada beberapa OPD teknis, kedepan akan kami berikan teguran dan peringatan agar bersungguh-sungguh dan lebih selektif dalam memilih konsultan perencanaan dan penyedia barang/jasa.
4.	Rencana Program Rehab Ringan, Sedang sampai dengan tahun 2022, bahwa bangunan fisik masih sangat bagus dan belum perlu rehab.	Terima kasih saran dan masukan, perihal rehab bangunan fisik tentunya melihat kondisi bangunan dimaksud.
5.	Agar memperbanyak pelatihan-pelatihan kerja dalam mengentaskan pengangguran yang tiap tahun semakin bertambah.	Terima kasih, bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten Rembang melalui UPT BLK pada DPMPTSPNAKER telah melaksanakan kegiatan dimaksud.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>VI. FRAKSI KARYA INDONESIA</u> <u>SEJAHTERA</u>	
1.	Keluhan para petani dengan jatuhnya harga beberapa hasil pertanian menjadikan petani merugi. Mohon penjelasan.	<p>1. Terkait harga komoditas pertanian yang sempat jatuh, Pemkab melalui Dintanpan sudah melakukan gerakan ASN peduli, Dintanpan juga mengajak para pihak untuk peduli dengan harga-harga komoditas pertanian, seperti saat ini BKK Lasem membeli 1 ton bawang merah di harga eceran rembang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang juga menggelar <u>Pasar Tani</u> di halaman kantor Dintanpan Pasar murah tersebut diikuti kelompok petani dari beberapa kecamatan di Kabupaten Rembang. Pasar tani tersebut merupakan fasilitas yang disediakan dintanpan untuk membantu memasarkan produk petani lokal Rembang. Karena ada beberapa komoditas pertanian di Rembang yang harganya anjlok.</p>
2.	Keluhan sebagian masyarakat terkait kartu BPJS nya tidak aktif serta beberapa haknya atas BPNT dipotong. Mohon penjelasan.	<p>2. BPJS tidak aktif dikarenakan datanya saat ini dimutakhirkan, penyebabnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIK tidak valid, tidak padu padan dengan aplikasi SIAK Dirjen Admidukcapil Kemendagri. 2. Nama berbeda <p>Yang sudah kita lakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data tidak aktif namun masuk DTKS maka kita rekomendasikan ke BPJS untuk segera diaktifkan. 2. Yang tidak masuk di DTKS, lewat Admin Desa, data kita masukkan dalam Aplikasi SIKN NG agar masuk DTKS. 3. data kita padu padankan dengan Dinas Dukcapil. <p>Sedangkan BPNT tidak dipotong dikarenakan uang ditransfer ke KPM dan langsung transaksi di EWarong.</p>

3.	Fraksi KIS mengarahkan agar Pemkab sejauh mungkin tidak hutang agar beban anggaran tidak semakin berat. Pemkab agar mengupayakan mengalihkan anggaran yang tidak prioritas untuk dialihkan ke program yang mendukung PEN Pemerintah Pusat.	3.	Terima kasih atas perhatian dan masukannya.
4.	Langkah-langkah dari Dinas Pertanian untuk mengatasi ketersediaan pupuk bersubsidi dengan kembali menggunakan pupuk organik.	4.	Kami sangat sepakat terkait upaya bersama pemanfaatan pupuk organik. Potensi pupuk organik dari ternak di Rembang sangat besar. Beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah fasilitasi usulan kegiatan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) ke pusat, tahun ini ada 6 kelompok penerima UPPO. Kerjasama dengan akademisi untuk uji lab kualitas pupuk organik produk kelompok tani di Rembang serta mengupayakan fasilitasi ijin edar produk pupuk organik dari kelompok tani Rembang.
5.	Program kegiatan apa saja yang dapat dijadikan daya tarik wisatawan agar mau datang ke kota pusaka lasem.	5.	Kabupaten Rembang dinilai memiliki potensi untuk didorong menjadi salah satu pusat fesyen Jawa Tengah. Didukung oleh kekayaan budaya berupa Batik Lasem Dengan diadakannya Acara Rembang Fashion Parade 2021 yang melibatkan 11 UMKM batik dan tujuh desainer. Para desainer mempertunjukkan hasil desain baju Batik Lasem khas Rembang yang diolah menjadi beragam busana siap pakai diharapkan dapat dijadikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kota pusaka Lasem.
6.	Tanggapan Pemkab terkait dengan kondisi jalan di Kabupaten Rembang disaat memasuki musim penghujan yang mulai mengalami kerusakan.	6.	Lihat jawaban pada Fraksi Nasdem.

7.	Mohon penjelasan langkah-langkah Pemkab dalam menyikapi dana dari pemerintah pusat agar tidak keponthal-ponthal dalam menyiapkan anggaran pendampingnya.	7.	PemKab Rembang dalam perencanaan penganggaran terkait dengan pembangunan fisik berusaha untuk menggabungkan perencanaan yang dianggarkan N-1 dalam rangka untuk percepatan proses pelaksanaan pada tahun anggaran berkenaan.
8.	Mohon penjelasan adanya kenaikan retribusi pedagang dipasar kota Rembang mengingat situasi masih pandemi.	8.	<p>Kenaikan retribusi pedagang pasar, mengacu pada Perda Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Kenaikan tarif retribusi pasar sebenarnya sudah dirancang cukup lama. Bahkan perancangnya sebelum adanya pandemi covid-19.</p> <p>Lebih tepatnya disahkan DPRD pada akhir 2019 dan terbit dalam peraturan daerah (perda) pada bulan Mei 2020. Jika dibandingkan dengan daerah lain retribusi pasar di Rembang sebelum ada kenaikan terbilang sangat rendah, meski saat ini kenaikannya hampir 100 persen lebih namun masih cukup terjangkau bagi pedagang.</p>
9.	Mohon penjelasan terkait proses pemindahan Pasar Kota Rembang hendaknya tetap memperhatikan aspirasi para pedagang.	9.	Lihat jawaban pada Fraksi Nasdem.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 23 November 2021

BUPATI REMBANG

 **H. ABDUL HAFIDZ** 



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : Selasa
Tanggal : 30 November 2021
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
 3. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
 4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
 5. Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

6. Penandatanganan Persetujuan bersama dan penyerahan surat keputusan DPRD atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
7. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. Supadi**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Pedias Yudith, P. S.H.**
2. Jabatan : Kabag Rapat Risalah dan Perundang - undangan

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 3 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Supadi**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

- Yang terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Rembang,
 Yang terhormat : Pimpinan dan segenap anggota DPRD
 Kabupaten Rembang
 Yang kami hormati : TAPD Kabupaten Rembang
 Dan yang kami hormati : Plt. Sekretaris DPRD beserta staf.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2021 kita kembali dapat bertemu untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua DPRD dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Saudara-Saudari yang telah meluangkan waktu dapat hadir mengikuti rapat paripurna ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 30 orang.

Keabsahan rapat paripurna kedua ini, sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 pada tanggal 23 November 2021 yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Atas dasar jumlah fisik anggota yang menghadiri rapat paripurna dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna kedua ini telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucap "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 14.26 WIB Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
3. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
5. Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
6. Penandatanganan Persetujuan bersama dan penyerahan surat keputusan DPRD atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
7. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
8. Penutup.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022.

Amanat Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

- ayat (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.

- ayat (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- ayat (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- ayat (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Memperhatikan ketentuan tersebut, berdasarkan hasil rapat Bapemperda bersama Bagian Hukum Setda pada tanggal 30 November 2021 pagi tadi, telah tersusun Propemperda Kabupaten Rembang Tahun 2022 yaitu sebanyak 15 raperda, terdiri atas 11 raperda berasal dari Bupati dan 4 Raperda usul prakarsa DPRD, sebagaimana Rancangan Keputusan DPRD yang fotocopynya berada di tangan Saudara-saudara anggota yang hadir pada rapat paripurna ini. Sebelum rancangan tersebut ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022, maka untuk persetujuannya saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022?”

===== SETUJUUUUU =====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara ketiga, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Untuk keperluan tersebut, kepada Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. saya minta untuk menyampaikannya.

LAPORAN BADAN ANGGARAN

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. atas bantuannya.

➤ (*Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir*)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara keempat yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Kepada anggota yang ditunjuk untuk menyampaikan Pendapat Fraksi, saya minta untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. H. Sunardi, S.Pd.I.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Sustiyono
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Sumarsih
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Agus Purnawan. Y.A.Md.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Wiwin Winarko, S.H.

Secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

PENDAPAT FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN 2022

Nama Fraksi	S	SDP	TS
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi Nasional Demokrat	✓		
Fraksi PDI Perjuangan	✓		
Fraksi Demokrat Hanura	✓		
Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	✓		

Keterangan : (S : setuju ; SDP : setuju dengan perubahan ; TS : tidak setuju).

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

➤ *(Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuk acara kelima yaitu Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Oleh karena moment ini sangat menentukan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rembang setahun ke depan, kami berharap kepada seluruh anggota DPRD untuk lebih fokus dalam memberikan tanggapan, oleh karena semua dimulai dari pengambilan keputusan saudara-saudara dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari pemberian persetujuan oleh Anggota, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati bersama Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD kepada Bupati Rembang. Agar pelaksanaan penandatanganan dan penyerahan surat keputusan DPRD dapat berjalan baik dan lancar, kepada Sekretariat DPRD saya minta untuk memandu jalannya prosesi. Waktu saya serahkan kepada Sekretariat DPRD. Disilahkan.

===== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN =====

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara terakhir, yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada Bupati Rembang, waktu dan tempat disilahkan.

===== PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaiannya.

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir)*

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Agenda rapat telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Bupati beserta jajarannya, rekan-

rekan pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan dengan lancar, sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Sebelum kami akhiri, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang, mengucapkan selamat Hari Korpri yang ke-50. Semoga momentum ini semakin meningkatkan semangat pengabdian ASN, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang. Amiin YRA.

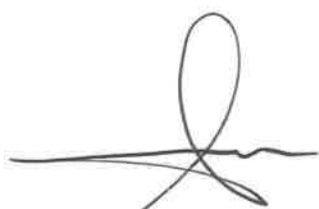
Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 15.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

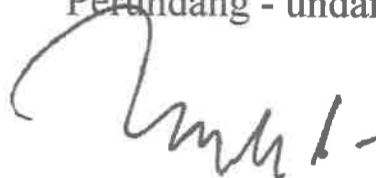
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. SUPADI

An. Plt. SEKRETARIS,
Kabag. Rapat Risalah dan
Perundang - undangan



PEDIAS YUDITH. P.S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631113 199402 1 001

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati Rembang, Sekda Rembang dan TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi- Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor *24* Tahun 2021 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : SELASA, 30 NOVEMBER 2021
PUKUL : 14.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	-
2	SUGIHARTO	Anggota	2	-
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	-
4	SUMARDI	Anggota	4	-
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	-
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	-
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	-
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	-
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	-
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	-
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	-
12	MAHMUDI	Anggota	12	-
13	ILYAS	Anggota	13	-
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	-
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	-
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	-
17	SUPADI	Anggota	17	-
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	-
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT				
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	-
20	SUSTIYONO	Anggota	20	-
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	-
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	-
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	-
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	-
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	-
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	-

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

HARI/TANGGAL : SELASA, 30 NOVEMBER 2021

PUKUL : 14.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1..... 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2..... 
3	FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekretaris Daerah	3..... 



P. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Rembang



Drs. DRUODO, M.Si
NIP. 19670421 198303 1 009

**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

HARI/TANGGAL : SELASA, 30 NOVEMBER 2021

PUKUL : 14.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Asisten I Sekda	1
2		Asisten II Sekda	2
3	H. WALLIYO	Asisten III Sekda	3
4	<i>[Signature]</i>	Ka. BPPKAD	4
5		Ka. BAPPEDA	5
6		Kabag. Hukum Setda	6
7	Wahyu Dhan	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	7
8	Sumadi NURPURNOMO	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20


 PII SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Badan Kesbangpol Kab. Rembang

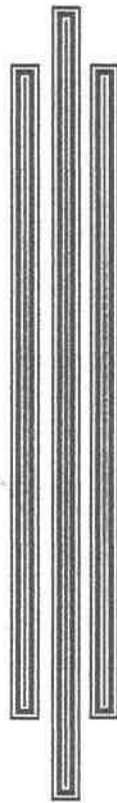
Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA

**PARIPURNA HARI SELASA TANGGAL 30 NOPEMBER 2021
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
2021**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA HARI SELASA
TANGGAL 30 NOPEMBER 2021 MEMBAHAS RAPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2022**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang atas Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebelum disepakati menjadi Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD;
2. bahwa hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
14. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/2611/2021 tanggal 16 Nopember 2021 perihal Berita Daerah Pengiriman Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
15. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 22 Nopember 2021 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

III. PELAKSANAAN

a. Rapat Peripurna I dilakukan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Nopember 2021

Jam : 13.30 WIB

Acara : - Penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD TA. 2022
- Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati
- Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi

- b. Rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
- Hari : Selasa
 - Tanggal : 23 Nopember 2021
 - Jam : 15.25 WIB
 - Acara : Penjelasan lanjutan atas Raperda APBD TA. 2022
- c. Rapat Banggar bersama TAPD, serta OPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
- Hari : Rabu – Jum'at
 - Tanggal : 24 - 26 Nopember 2021
 - Jam : 13.00 WIB
 - Acara : Pendalaman terhadap Rancangan Perda APBD TA. 2022
- d. Rapat Banggar Internal Kabupaten Rembang dilakukan pada :
- Hari : Senin
 - Tanggal : 29 Nopember 2021
 - Jam : 12.00 WIB
 - Acara : Penyusunan laporan pembahasan raperda APBD Tahun Anggaran 2022
- e. Rapat Fraksi dilakukan pada :
- Hari : Senin
 - Tanggal : 29 Nopember 2021
 - Jam : 13.00 WIB
 - Acara : Menyusun Pendapat Fraksi atas Rancangan Perda APBD TA. 2022

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

RINGKASAN RAPBD PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	RAPBD 2022	Pembahasan	
			Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATANDAERAH	1,874,516,280,000.00	1,874,516,280,000.00	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	373,771,127,000.00	373,771,127,000.00	-
4.1.01	Pajak Daerah	122,505,000,000.00	122,505,000,000.00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	32,374,500,000.00	32,374,500,000.00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,250,000,000.00	19,250,000,000.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199,641,627,000.00	199,641,627,000.00	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,495,745,153,000.00	1,495,745,153,000.00	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,373,545,153,000.00	1,373,545,153,000.00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122,200,000,000.00	122,200,000,000.00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1,874,516,280,000.00	1,874,516,280,000.00	-
5	BELANJA	2,189,938,582,051.00	2,203,102,306,051.00	13,163,724,000.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,332,544,594,820.00	1,334,449,731,352.00	1,905,136,532.00
5.1.01	Belanja Pegawai	771,736,258,703.00	771,796,748,703.00	60,490,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375,080,967,852.00	380,435,114,384.00	5,354,146,532.00
5.2.02	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	180,744,596,265.00	180,605,096,265.00	(139,500,000.00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,982,772,000.00	1,612,772,000.00	(3,370,000,000.00)
5.2	BELANJA MODAL	436,713,732,231.00	448,592,319,699.00	11,878,587,468.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	128,602,300,000.00	128,602,300,000.00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,639,850,631.00	74,408,090,233.00	26,768,239,602.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,261,264,600.00	70,234,467,600.00	(25,026,797,000.00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	164,725,997,000.00	174,625,561,866.00	9,899,564,866.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484,320,000.00	721,900,000.00	237,580,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	414,580,255,000.00	413,960,255,000.00	(620,000,000.00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10,391,229,000.00	10,391,229,000.00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	404,189,026,000.00	403,569,026,000.00	(620,000,000.00)
	Jumlah Belanja	2,189,938,582,051.00	2,203,102,306,051.00	13,163,724,000.00
	Total Surplus/(Defisit)	(315,422,302,051.00)	(328,586,026,051.00)	(13,163,724,000.00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	372,290,670,051.00	385,454,394,051.00	13,163,724,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122,290,670,051.00	135,454,394,051.00	13,163,724,000.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	372,290,670,051.00	385,454,394,051.00	13,163,724,000.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56,868,368,000.00	56,868,368,000.00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53,868,368,000.00	53,868,368,000.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	56,868,368,000.00	56,868,368,000.00	-
	Pembiayaan Netto	315,422,302,051.00	328,586,026,051.00	13,163,724,000.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

INDUK 2022													
NO	OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH					PENDAPATAN TRANSFER			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		JUMLAH	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	10,000,000.00											10,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN	30,000,000.00			52,071,627,000.00								52,101,627,000.00
3	RSUD dr. R. SOETRASNO				140,000,000,000.00								140,000,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,750,000,000.00			30,000,000.00								1,780,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,610,000,000.00											3,610,000,000.00
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	210,000,000.00											210,000,000.00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	350,000,000.00											350,000,000.00
8	DINAS PERHUBUNGAN	2,319,500,000.00											2,319,500,000.00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	75,000,000.00											75,000,000.00
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,040,000,000.00											1,040,000,000.00
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15,000,000,000.00											15,000,000,000.00
12	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	7,760,000,000.00			82,000,000.00								7,842,000,000.00
13	SETDA												100,000,000.00
14	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	122,505,000,000.00	120,000,000.00	19,250,000,000.00	7,458,000,000.00	1,373,545,153,000.00	122,200,000,000.00	5,000,000,000.00					1,650,078,153,000.00
	JUMLAH	122,505,000,000.00	32,374,500,000.00	19,250,000,000.00	199,641,627,000.00	1,373,545,153,000.00	122,200,000,000.00	5,000,000,000.00					1,874,516,280,000.00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	PEMBAHASAN										JUMLAH		
		PENDAPATAN ASLI DAERAH					PENDAPATAN TRANSFER			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan					
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		10,000,000.00											10,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN		30,000,000.00		52,071,627,000.00									52,101,627,000.00
3	RSUD dr. R. SOETRASNO				140,000,000,000.00									140,000,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1,750,000,000.00		30,000,000.00									1,780,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		3,610,000,000.00											3,610,000,000.00
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		210,000,000.00											210,000,000.00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		350,000,000.00											350,000,000.00
8	DINAS PERHUBUNGAN		2,319,500,000.00											2,319,500,000.00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		75,000,000.00											75,000,000.00
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1,040,000,000.00											1,040,000,000.00
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		15,000,000,000.00											15,000,000,000.00
12	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		7,760,000,000.00		82,000,000.00									7,842,000,000.00
13	SETDA		100,000,000.00											100,000,000.00
14	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	122,505,000,000.00	120,000,000.00	19,250,000,000.00	7,459,000,000.00			1,373,545,153,000.00		122,200,000,000.00		5,000,000,000.00		1,650,078,153,000.00
	JUMLAH	122,505,000,000.00	32,374,500,000.00	19,250,000,000.00	199,641,627,000.00			1,373,545,153,000.00		122,200,000,000.00		5,000,000,000.00		1,874,616,280,000.00

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)											
		PENDAPATAN ASLI DAERAH					PENDAPATAN TRANSFER			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		JUMLAH	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
2	DINAS KESEHATAN												
3	RSUD dr. R. SOETRASNO												
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWAGAN PERMUKIMAN												
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN												
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
8	DINAS PERHUBUNGAN												
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN												
12	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH												
13	SETDA												
14	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
	JUMLAH												

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah**

NO	OPD	RAPBD 2022		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	516,984,580,013.00	67,472,425,526.00	-
2	DINAS KESEHATAN	166,639,972,140.00	10,493,262,060.00	-
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	151,324,164,500.00	17,124,900,000.00	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15,196,929,600.00	272,894,259,000.00	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14,124,722,295.00	17,865,011,705.00	-
6	SATPOL PP	8,657,368,250.00	78,294,750.00	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,208,539,800.00	153,290,200.00	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	20,444,203,148.00	1,642,662,852.00	-
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	66,268,039,600.00	8,013,253,400.00	-
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16,653,869,800.00	2,916,548,400.00	-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5,471,597,000.00	44,000,000.00	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12,162,415,200.00	124,019,400.00	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	18,023,711,000.00	11,900,930,000.00	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,750,388,400.00	959,140,000.00	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	8,885,651,665.00	1,041,829,335.00	-
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14,837,144,000.00	429,200,000.00	-
17	DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	4,095,282,525.00	177,300,000.00	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15,967,490,980.00	2,092,879,220.00	-
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	18,185,381,080.00	15,546,710,920.00	-
20	SETDA	72,532,952,183.00	1,919,458,417.00	-
21	SEKRETARIAT DPRD	60,247,221,700.00	182,480,000.00	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,372,344,800.00	195,060,000.00	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	33,558,637,412.00	776,730,000.00	6,100,000,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10,720,297,600.00	10,000,000.00	-
25	INSPEKTORAT	9,425,171,000.00	133,200,000.00	-
26	KECAMATAN REMBANG	9,160,715,475.00	1,267,949,700.00	-
27	KECAMATAN KALIORI	2,726,676,725.00	56,000,000.00	-
28	KECAMATAN SULANG	2,736,353,925.00	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	2,516,256,425.00	50,000,000.00	-
30	KECAMATAN BULU	2,228,152,775.00	-	-
31	KECAMATAN LASEM	2,875,715,200.00	36,500,000.00	-
32	KECAMATAN PANCUR	2,676,669,605.00	29,870,520.00	-
33	KECAMATAN SLUKE	3,473,530,432.00	271,452,068.00	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	2,474,312,150.00	38,650,000.00	-
35	KECAMATAN GUNEM	2,034,319,875.00	200,000,000.00	-
36	KECAMATAN SALE	2,269,021,700.00	12,000,000.00	-
37	KECAMATAN KRAGAN	2,822,171,352.00	218,949,998.00	-
38	KECAMATAN SEDAN	2,575,445,750.00	8,000,000.00	-
39	KECAMATAN SARANG	2,908,909,500.00	170,000,000.00	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9,328,268,240.00	167,514,760.00	-
	JUMLAH	1,332,544,594,820.00	436,713,732,231.00	6,100,000,000.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah**

NO	OPD	RAPBD 2022	
		Belanja Transfer	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	584,457,005,539.00
2	DINAS KESEHATAN	-	177,133,234,200.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	168,449,064,500.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	288,091,188,600.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	31,989,734,000.00
6	SATPOL PP	-	8,735,663,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	6,361,830,000.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	22,086,866,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	74,281,293,000.00
10	DINAS L NGKUNGAN HIDUP	-	19,570,418,200.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	5,515,597,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	365,000,000.00	12,651,434,600.00
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	29,924,641,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	7,709,528,400.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	9,927,481,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	15,266,344,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	4,272,582,525.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	18,060,370,200.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	33,732,092,000.00
20	SETDA	-	74,452,410,600.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	60,429,701,700.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	6,567,404,800.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	414,215,255,000.00	454,650,622,412.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	10,730,297,600.00
25	INSPEKTORAT	-	9,558,371,000.00
26	KECAMATAN REMBANG	-	10,428,665,175.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	2,782,676,725.00
28	KECAMATAN SULANG	-	2,736,353,925.00
29	KECAMATAN SUMBER	-	2,566,256,425.00
30	KECAMATAN BULU	-	2,228,152,775.00
31	KECAMATAN LASEM	-	2,912,215,200.00
32	KECAMATAN PANCUR	-	2,706,540,125.00
33	KECAMATAN SLUKE	-	3,744,982,500.00
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	2,512,962,150.00
35	KECAMATAN GUNEM	-	2,234,319,875.00
36	KECAMATAN SALE	-	2,281,021,700.00
37	KECAMATAN KRAGAN	-	3,041,121,350.00
38	KECAMATAN SEDAN	-	2,583,445,750.00
39	KECAMATAN SARANG	-	3,078,909,500.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	9,495,783,000.00
	JUMLAH	414,580,255,000.00	2,189,938,582,051.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	514,015,117,013.00	68,485,888,526.00	-
2	DINAS KESEHATAN	166,639,972,140.00	10,793,262,060.00	-
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	151,324,164,500.00	17,124,900,000.00	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15,281,929,600.00	283,004,259,000.00	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13,804,722,295.00	17,885,011,705.00	-
6	SATPOL PP	8,954,468,250.00	116,194,750.00	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,208,539,800.00	153,290,200.00	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	20,728,403,148.00	1,653,462,852.00	-
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	66,180,168,600.00	8,388,124,400.00	-
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16,653,074,800.00	2,657,343,400.00	-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5,465,597,000.00	50,000,000.00	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12,181,490,200.00	114,944,400.00	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	18,018,116,000.00	11,906,525,000.00	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,742,063,400.00	967,465,000.00	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	9,420,651,665.00	1,241,829,335.00	-
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14,132,144,000.00	429,200,000.00	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,096,702,525.00	275,880,000.00	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16,812,490,980.00	1,772,879,220.00	-
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	18,145,381,080.00	15,546,710,920.00	-
20	SETDA	72,985,652,183.00	2,126,758,417.00	-
21	SEKRETARIAT DPRD	63,167,641,500.00	211,784,200.00	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,372,344,800.00	195,060,000.00	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	33,671,937,412.00	763,430,000.00	6,100,000,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	10,720,297,600.00	10,000,000.00	-
25	INSPEKTORAT	9,425,171,000.00	133,200,000.00	-
26	KECAMATAN REMBANG	9,086,250,609.00	1,392,414,566.00	-
27	KECAMATAN KALIOR	2,726,676,725.00	56,000,000.00	-
28	KECAMATAN SULANG	2,736,353,925.00	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	2,516,256,425.00	50,000,000.00	-
30	KECAMATAN BULU	2,228,152,775.00	-	-
31	KECAMATAN LASEM	2,874,390,200.00	37,825,000.00	-
32	KECAMATAN PANCUR	2,676,669,605.00	29,870,520.00	-
33	KECAMATAN SLUKE	3,473,540,432.00	271,442,068.00	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	2,474,312,150.00	38,650,000.00	-
35	KECAMATAN GUNEM	2,034,319,875.00	200,000,000.00	-
36	KECAMATAN SALE	2,269,021,700.00	12,000,000.00	-
37	KECAMATAN KRAGAN	2,721,121,350.00	20,000,000.00	-
38	KECAMATAN SEDAN	2,575,445,750.00	78,000,000.00	-
39	KECAMATAN SARANG	2,908,909,500.00	170,000,000.00	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10,000,068,840.00	228,714,160.00	-
	JUMLAH	1,334,449,731,352.00	448,592,319,699.00	6,100,000,000.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN	
		Belanja Transfer	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	582,501,005,539.00
2	DINAS KESEHATAN	-	177,433,234,200.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	168,449,064,500.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	298,286,188,600.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	31,689,734,000.00
6	SATPOL PP	-	9,070,663,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	6,361,830,000.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	22,381,866,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	74,568,293,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	19,310,418,200.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	5,515,597,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	12,296,434,600.00
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	29,924,641,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	7,709,528,400.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	10,662,481,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	14,561,344,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	4,372,582,525.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	18,585,370,200.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	33,692,092,000.00
20	SETDA	-	75,112,410,600.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	63,379,425,700.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	6,567,404,800.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	413,960,255,000.00	454,495,622,412.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	10,730,297,600.00
25	INSPEKTORAT	-	9,558,371,000.00
26	KECAMATAN REMBANG	-	10,478,665,175.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	2,782,676,725.00
28	KECAMATAN SULANG	-	2,736,353,925.00
29	KECAMATAN SUMBER	-	2,566,256,425.00
30	KECAMATAN BULU	-	2,228,152,775.00
31	KECAMATAN LASEM	-	2,912,215,200.00
32	KECAMATAN PANCUR	-	2,706,540,125.00
33	KECAMATAN SLUKE	-	3,744,982,500.00
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	2,512,962,150.00
35	KECAMATAN GUNEM	-	2,234,319,875.00
36	KECAMATAN SALE	-	2,281,021,700.00
37	KECAMATAN KRAGAN	-	2,741,121,350.00
38	KECAMATAN SEDAN	-	2,653,445,750.00
39	KECAMATAN SARANG	-	3,078,909,500.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	10,228,783,000.00
	JUMLAH	413,960,255,000.00	2,203,102,306,051.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah**

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(2,969,463,000.00)	1,013,463,000.00	-
2	DINAS KESEHATAN	-	300,000,000.00	-
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85,000,000.00	10,110,000,000.00	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(320,000,000.00)	20,000,000.00	-
6	SATPOL PP	297,100,000.00	37,900,000.00	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	284,200,000.00	10,800,000.00	-
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(87,871,000.00)	374,871,000.00	-
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(795,000.00)	(259,205,000.00)	-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	(6,000,000.00)	6,000,000.00	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19,075,000.00	(9,075,000.00)	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	(5,595,000.00)	5,595,000.00	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(8,325,000.00)	8,325,000.00	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	535,000,000.00	200,000,000.00	-
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(705,000,000.00)	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,420,000.00	98,580,000.00	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	845,000,000.00	(320,000,000.00)	-
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	(40,000,000.00)	-	-
20	SETDA	452,700,000.00	207,300,000.00	-
21	SEKRETARIAT DPRD	2,920,419,800.00	29,304,200.00	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	113,300,000.00	(13,300,000.00)	-
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	(74,464,866.00)	124,464,866.00	-
27	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
28	KECAMATAN SULANG	-	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	-	-	-
30	KECAMATAN BULU	-	-	-
31	KECAMATAN LASEM	(1,325,000.00)	1,325,000.00	-
32	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	10,000.00	(10,000.00)	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	(101,050,002.00)	(198,949,998.00)	-
38	KECAMATAN SEDAN	-	70,000,000.00	-
39	KECAMATAN SARANG	-	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	671,800,600.00	61,199,400.00	-
	JUMLAH	1,905,136,532.00	11,878,587,468.00	-

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah**

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Belanja Transfer	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	(1,956,000,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	300,000,000.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	10,195,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	(300,000,000.00)
6	SATPOL PP	-	335,000,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	295,000,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	287,000,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(260,000,000.00)
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(365,000,000.00)	(355,000,000.00)
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	735,000,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	(705,000,000.00)
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	100,000,000.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	525,000,000.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	(40,000,000.00)
20	SETDA	-	660,000,000.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	2,949,724,000.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(255,000,000.00)	(155,000,000.00)
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	-	50,000,000.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	-
28	KECAMATAN SULANG	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	-	-
30	KECAMATAN BULU	-	-
31	KECAMATAN LASEM	-	-
32	KECAMATAN PANCUR	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	-	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	-	(300,000,000.00)
38	KECAMATAN SEDAN	-	70,000,000.00
39	KECAMATAN SARANG	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	733,000,000.00
	JUMLAH	(620,000,000.00)	13,163,724,000.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	RAPBD 2022		
		Belanja Operasi		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	375,905,850,400.00	36,281,359,613.00	
2	DINAS KESEHATAN	90,960,437,037.00	75,679,535,103.00	
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	96,516,080,500.00	54,808,084,000.00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,759,954,600.00	6,436,975,000.00	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,549,551,000.00	3,583,171,295.00	
6	SATPOL PP	6,827,803,000.00	1,829,565,250.00	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,966,295,000.00	3,242,244,800.00	
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,960,001,000.00	14,540,430,148.00	
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	16,528,882,000.00	8,444,698,267.00	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,406,153,200.00	7,107,716,600.00	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,544,772,000.00	1,926,825,000.00	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,258,624,600.00	7,609,055,600.00	
13	DINAS PERHUBUNGAN	5,371,996,000.00	12,651,715,000.00	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,344,913,400.00	3,405,475,000.00	
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,941,451,000.00	3,944,200,665.00	
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,035,299,000.00	11,290,845,000.00	
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,919,219,400.00	1,176,063,125.00	
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,766,990,200.00	6,375,500,780.00	
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	10,302,377,000.00	7,883,004,080.00	
20	SETDA	17,348,353,600.00	35,151,598,583.00	
21	SEKRETARIAT DPRD	27,740,357,912.00	32,506,863,788.00	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,601,180,800.00	2,771,164,000.00	
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21,660,724,654.00	11,897,912,758.00	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4,420,637,600.00	6,299,660,000.00	
25	INSPEKTORAT	4,447,636,000.00	4,977,535,000.00	
26	KECAMATAN REMBANG	6,278,161,200.00	2,882,554,275.00	
27	KECAMATAN KALIORI	2,292,560,600.00	434,116,125.00	
28	KECAMATAN SULANG	2,216,204,000.00	520,149,925.00	
29	KECAMATAN SUMBER	2,115,440,000.00	400,816,425.00	
30	KECAMATAN BULU	1,764,798,000.00	463,354,775.00	
31	KECAMATAN LASEM	2,367,734,000.00	507,981,200.00	
32	KECAMATAN PANCUR	2,035,478,000.00	641,191,605.00	
33	KECAMATAN SLUKE	1,782,706,000.00	1,690,824,432.00	
34	KECAMATAN PAMOTAN	1,907,751,000.00	566,561,150.00	
35	KECAMATAN GUNEM	1,527,821,000.00	506,498,875.00	
36	KECAMATAN SALE	1,873,738,000.00	395,283,700.00	
37	KECAMATAN KRAGAN	2,066,352,000.00	755,819,352.00	
38	KECAMATAN SEDAN	1,956,754,000.00	618,691,750.00	
39	KECAMATAN SARANG	2,372,092,000.00	536,817,500.00	
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,093,128,000.00	2,339,108,308.00	
	JUMLAH	771,736,258,703.00	375,080,967,852.00	-

Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	RAPBD 2022		
		Belanja Operasi		
		Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Jumlah Belanja Operasi
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	101,567,370,000.00	3,230,000,000.00	516,984,580,013.00
2	DINAS KESEHATAN			166,639,972,140.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO			151,324,164,500.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			15,196,929,600.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,652,000,000.00	1,340,000,000.00	14,124,722,295.00
6	SATPOL PP			8,657,368,250.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6,208,539,800.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	725,000,000.00	218,772,000.00	20,444,203,148.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	41,100,459,333.00	194,000,000.00	66,268,039,600.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,140,000,000.00		16,653,869,800.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			5,471,597,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,294,735,000.00		12,162,415,200.00
13	DINAS PERHUBUNGAN			18,023,711,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6,750,388,400.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			8,885,651,665.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	511,000,000.00		14,837,144,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			4,095,282,525.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,825,000,000.00		15,967,490,980.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			18,185,381,080.00
20	SETDA	20,033,000,000.00		72,532,952,183.00
21	SEKRETARIAT DPRD			60,247,221,700.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			6,372,344,800.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		-	33,558,637,412.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			10,720,297,600.00
25	INSPEKTORAT			9,425,171,000.00
26	KECAMATAN REMBANG			9,160,715,475.00
27	KECAMATAN KALIORI			2,726,676,725.00
28	KECAMATAN SULANG			2,736,353,925.00
29	KECAMATAN SUMBER			2,516,256,425.00
30	KECAMATAN BULU			2,228,152,775.00
31	KECAMATAN LASEM			2,875,715,200.00
32	KECAMATAN PANCUR			2,676,669,605.00
33	KECAMATAN SLUKE			3,473,530,432.00
34	KECAMATAN PAMOTAN			2,474,312,150.00
35	KECAMATAN GUNEM			2,034,319,875.00
36	KECAMATAN SALE			2,269,021,700.00
37	KECAMATAN KRAGAN			2,822,171,352.00
38	KECAMATAN SEDAN			2,575,445,750.00
39	KECAMATAN SARANG			2,908,909,500.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,896,031,932.00		9,328,268,240.00
	JUMLAH	180,744,596,265.00	4,982,772,000.00	1,332,544,594,820.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	RAPBD 2022		
		Belanja Modal		
		Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,675,000,000.00	2,362,307,526.00	63,324,118,000.00
2	DINAS KESEHATAN		7,213,263,460.00	2,879,998,600.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	2,000,000,000.00	14,544,900,000.00	400,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120,000,000,000.00	31,325,000.00	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		389,118,705.00	7,150,000,000.00
6	SATPOL PP		78,294,750.00	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		153,290,200.00	
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		650,122,852.00	992,540,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		1,073,365,400.00	6,161,888,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	2,413,658,400.00	402,720,000.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		44,000,000.00	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		124,019,400.00	
13	DINAS PERHUBUNGAN		11,620,930,000.00	280,000,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		947,140,000.00	
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		1,041,829,335.00	
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		61,200,000.00	368,000,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		177,300,000.00	
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		394,879,220.00	1,638,000,000.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,927,300,000.00	592,915,920.00	9,950,000,000.00
20	SETDA		1,869,633,417.00	
21	SEKRETARIAT DPRD		182,480,000.00	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		195,060,000.00	
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		776,730,000.00	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		10,000,000.00	
25	INSPEKTORAT		133,200,000.00	
26	KECAMATAN REMBANG		73,949,700.00	990,000,000.00
27	KECAMATAN KALIORI		6,000,000.00	50,000,000.00
28	KECAMATAN SULANG			
29	KECAMATAN SUMBER			
30	KECAMATAN BULU			
31	KECAMATAN LASEM		36,500,000.00	
32	KECAMATAN PANCUR		29,870,520.00	
33	KECAMATAN SLUKE		51,452,068.00	220,000,000.00
34	KECAMATAN PAMOTAN		38,650,000.00	
35	KECAMATAN GUNEM			200,000,000.00
36	KECAMATAN SALE		12,000,000.00	
37	KECAMATAN KRAGAN		114,949,998.00	104,000,000.00
38	KECAMATAN SEDAN		8,000,000.00	
39	KECAMATAN SARANG		20,000,000.00	150,000,000.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		167,514,760.00	
	JUMLAH	128,602,300,000.00	47,639,850,631.00	95,261,264,600.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	RAPBD 2022		
		Belanja Modal		
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Jumlah Belanja Modal
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5,000,000.00	106,000,000.00	67,472,425,526.00
2	DINAS KESEHATAN	400,000,000.00		10,493,262,060.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO		180,000,000.00	17,124,900,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	152,862,934,000.00		272,894,259,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,325,893,000.00		17,865,011,705.00
6	SATPOL PP			78,294,750.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			153,290,200.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			1,642,662,852.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	778,000,000.00	-	8,013,253,400.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100,170,000.00		2,916,548,400.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			44,000,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			124,019,400.00
13	DINAS PERHUBUNGAN			11,900,930,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		12,000,000.00	959,140,000.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			1,041,829,335.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			429,200,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			177,300,000.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		60,000,000.00	2,092,879,220.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		76,495,000.00	15,546,710,920.00
20	SETDA		49,825,000.00	1,919,458,417.00
21	SEKRETARIAT DPRD			182,480,000.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			195,060,000.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			776,730,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			10,000,000.00
25	INSPEKTORAT			133,200,000.00
26	KECAMATAN REMBANG	204,000,000.00		1,267,949,700.00
27	KECAMATAN KALIORI			56,000,000.00
28	KECAMATAN SULANG			-
29	KECAMATAN SUMBER	50,000,000.00		50,000,000.00
30	KECAMATAN BULU			-
31	KECAMATAN LASEM			36,500,000.00
32	KECAMATAN PANCUR			29,870,520.00
33	KECAMATAN SLUKE			271,452,068.00
34	KECAMATAN PAMOTAN			38,650,000.00
35	KECAMATAN GUNEM			200,000,000.00
36	KECAMATAN SALE			12,000,000.00
37	KECAMATAN KRAGAN			218,949,998.00
38	KECAMATAN SEDAN			8,000,000.00
39	KECAMATAN SARANG			170,000,000.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			167,514,760.00
	JUMLAH	164,725,997,000.00	484,320,000.00	436,713,732,231.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	RAPBD 2022		
		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
			Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
2	DINAS KESEHATAN			
3	RSUD dr. R.SOETRASNO			
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
6	SATPOL PP			
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			365,000,000.00
13	DINAS PERHUBUNGAN			
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
20	SETDA			
21	SEKRETARIAT DPRD			
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6,100,000,000.00	10,391,229,000.00	403,824,026,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
25	INSPEKTORAT			
26	KECAMATAN REMBANG			
27	KECAMATAN KALIORI			
28	KECAMATAN SULANG			
29	KECAMATAN SUMBER			
30	KECAMATAN BULU			
31	KECAMATAN LASEM			
32	KECAMATAN PANCUR			
33	KECAMATAN SLUKE			
34	KECAMATAN PAMOTAN			
35	KECAMATAN GUNEM			
36	KECAMATAN SALE			
37	KECAMATAN KRAGAN			
38	KECAMATAN SEDAN			
39	KECAMATAN SARANG			
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	JUMLAH	6,100,000,000.00	10,391,229,000.00	404,189,026,000.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	RAPBD 2022	
		Jumlah Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	584,457,005,539.00
2	DINAS KESEHATAN	-	177,133,234,200.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	168,449,064,500.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	288,091,188,600.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	31,989,734,000.00
6	SATPOL PP	-	8,735,663,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	6,361,830,000.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	22,086,866,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	74,281,293,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	19,570,418,200.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	5,515,597,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	365,000,000.00	12,651,434,600.00
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	29,924,641,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	7,709,528,400.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	9,927,481,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	15,266,344,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	4,272,582,525.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	18,060,370,200.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	33,732,092,000.00
20	SETDA	-	74,452,410,600.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	60,429,701,700.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	6,567,404,800.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	414,215,255,000.00	454,650,622,412.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	10,730,297,600.00
25	INSPEKTORAT	-	9,558,371,000.00
26	KECAMATAN REMBANG	-	10,428,665,175.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	2,782,676,725.00
28	KECAMATAN SULANG	-	2,736,353,925.00
29	KECAMATAN SUMBER	-	2,566,256,425.00
30	KECAMATAN BULU	-	2,228,152,775.00
31	KECAMATAN LASEM	-	2,912,215,200.00
32	KECAMATAN PANCUR	-	2,706,540,125.00
33	KECAMATAN SLUKE	-	3,744,982,500.00
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	2,512,962,150.00
35	KECAMATAN GUNEM	-	2,234,319,875.00
36	KECAMATAN SALE	-	2,281,021,700.00
37	KECAMATAN KRAGAN	-	3,041,121,350.00
38	KECAMATAN SEDAN	-	2,583,445,750.00
39	KECAMATAN SARANG	-	3,078,909,500.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	9,495,783,000.00
	JUMLAH	414,580,255,000.00	2,189,938,582,051.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN		
		Belanja Operasi		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	375,890,150,400.00	35,887,596,613.00	
2	DINAS KESEHATAN	90,960,437,037.00	75,679,535,103.00	
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	96,516,080,500.00	54,808,084,000.00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,857,054,600.00	6,424,875,000.00	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,543,511,000.00	3,469,211,295.00	
6	SATPOL PP	6,832,783,000.00	2,121,685,250.00	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,966,975,000.00	3,241,564,800.00	
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,955,006,000.00	14,814,625,148.00	
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	16,517,917,000.00	9,432,292,267.00	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,406,153,200.00	7,106,921,600.00	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,542,872,000.00	1,922,725,000.00	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,255,374,600.00	7,631,380,600.00	
13	DINAS PERHUBUNGAN	5,364,736,000.00	12,653,380,000.00	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,334,948,400.00	3,407,115,000.00	
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,945,926,000.00	4,474,725,665.00	
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,033,769,000.00	10,602,375,000.00	
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,922,839,400.00	1,173,863,125.00	
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,775,690,200.00	6,906,800,780.00	
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	10,302,252,000.00	7,843,129,080.00	
20	SETDA	17,336,708,600.00	35,405,943,583.00	
21	SEKRETARIAT DPRD	27,743,457,912.00	35,424,183,588.00	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,601,180,800.00	2,771,164,000.00	
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21,662,024,654.00	12,009,912,758.00	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4,420,637,600.00	6,299,660,000.00	
25	INSPEKTORAT	4,447,636,000.00	4,977,535,000.00	
26	KECAMATAN REMBANG	6,287,521,200.00	2,798,729,409.00	
27	KECAMATAN KALIORI	2,292,560,600.00	434,116,125.00	
28	KECAMATAN SULANG	2,215,634,000.00	520,719,925.00	
29	KECAMATAN SUMBER	2,115,080,000.00	401,176,425.00	
30	KECAMATAN BULU	1,764,798,000.00	463,354,775.00	
31	KECAMATAN LASEM	2,366,409,000.00	507,981,200.00	
32	KECAMATAN PANCUR	2,035,478,000.00	641,191,605.00	
33	KECAMATAN SLUKE	1,777,216,000.00	1,696,324,432.00	
34	KECAMATAN PAMOTAN	1,907,751,000.00	566,561,150.00	
35	KECAMATAN GUNEM	1,527,821,000.00	506,498,875.00	
36	KECAMATAN SALE	1,873,738,000.00	395,283,700.00	
37	KECAMATAN KRAGAN	2,062,957,000.00	658,164,350.00	
38	KECAMATAN SEDAN	1,956,754,000.00	618,691,750.00	
39	KECAMATAN SARANG	2,372,092,000.00	536,817,500.00	
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,104,818,000.00	3,199,218,908.00	
	JUMLAH	771,796,748,703.00	380,435,114,384.00	-

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN		
		Belanja Operasi		
		Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Jumlah Belanja Operasi
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	102,177,370,000.00	60,000,000.00	514,015,117,013.00
2	DINAS KESEHATAN			166,639,972,140.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO			151,324,164,500.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			15,281,929,600.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,652,000,000.00	1,140,000,000.00	13,804,722,295.00
6	SATPOL PP			8,954,468,250.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6,208,539,800.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	740,000,000.00	218,772,000.00	20,728,403,148.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	40,035,959,333.00	194,000,000.00	66,180,168,600.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,140,000,000.00		16,653,074,800.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			5,465,597,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,294,735,000.00		12,181,490,200.00
13	DINAS PERHUBUNGAN			18,018,116,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6,742,063,400.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			9,420,651,665.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	496,000,000.00		14,132,144,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			4,096,702,525.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,130,000,000.00		16,812,490,980.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			18,145,381,080.00
20	SETDA	20,243,000,000.00		72,985,652,183.00
21	SEKRETARIAT DPRD			63,167,641,500.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			6,372,344,800.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			33,671,937,412.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			10,720,297,600.00
25	INSPEKTORAT			9,425,171,000.00
26	KECAMATAN REMBANG			9,086,250,609.00
27	KECAMATAN KALIORI			2,726,676,725.00
28	KECAMATAN SULANG			2,736,353,925.00
29	KECAMATAN SUMBER			2,516,256,425.00
30	KECAMATAN BULU			2,228,152,775.00
31	KECAMATAN LASEM			2,874,390,200.00
32	KECAMATAN PANCUR			2,676,669,605.00
33	KECAMATAN SLUKE			3,473,540,432.00
34	KECAMATAN PAMOTAN			2,474,312,150.00
35	KECAMATAN GUNEM			2,034,319,875.00
36	KECAMATAN SALE			2,269,021,700.00
37	KECAMATAN KRAGAN			2,721,121,350.00
38	KECAMATAN SEDAN			2,575,445,750.00
39	KECAMATAN SARANG			2,908,909,500.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,696,031,932.00		10,000,068,840.00
	JUMLAH	180,605,096,265.00	1,612,772,000.00	1,334,449,731,352.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN		
		Belanja Modal		
		Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,675,000,000.00	28,815,157,526.00	37,750,731,000.00
2	DINAS KESEHATAN		7,313,263,460.00	3,079,998,600.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	2,000,000,000.00	14,544,900,000.00	400,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120,000,000,000.00	31,325,000.00	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		389,118,705.00	7,650,000,000.00
6	SATPOL PP		68,294,750.00	47,900,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		153,290,200.00	
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		650,122,852.00	1,003,340,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		1,446,336,400.00	6,163,788,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	2,154,453,400.00	402,720,000.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		50,000,000.00	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		114,944,400.00	
13	DINAS PERHUBUNGAN		11,626,525,000.00	280,000,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		955,465,000.00	
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		1,041,829,335.00	200,000,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		61,200,000.00	368,000,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		177,300,000.00	
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		434,879,220.00	1,278,000,000.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,927,300,000.00	592,915,920.00	9,950,000,000.00
20	SETDA		1,876,833,417.00	
21	SEKRETARIAT DPRD		211,784,200.00	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		195,060,000.00	
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		763,430,000.00	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		10,000,000.00	
25	INSPEKTORAT		133,200,000.00	
26	KECAMATAN REMBANG		73,949,700.00	1,040,000,000.00
27	KECAMATAN KALIORI		6,000,000.00	50,000,000.00
28	KECAMATAN SULANG			
29	KECAMATAN SUMBER			
30	KECAMATAN BULU			
31	KECAMATAN LASEM		37,825,000.00	
32	KECAMATAN PANCUR		29,870,520.00	
33	KECAMATAN SLUKE		51,452,068.00	219,990,000.00
34	KECAMATAN PAMOTAN		38,650,000.00	
35	KECAMATAN GUNEM			200,000,000.00
36	KECAMATAN SALE		12,000,000.00	
37	KECAMATAN KRAGAN		20,000,000.00	-
38	KECAMATAN SEDAN		78,000,000.00	
39	KECAMATAN SARANG		20,000,000.00	150,000,000.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		228,714,160.00	
	JUMLAH	128,602,300,000.00	74,408,090,233.00	70,234,467,600.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN		
		Belanja Modal		
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Jumlah Belanja Modal
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	245,000,000.00	68,485,888,526.00
2	DINAS KESEHATAN	400,000,000.00		10,793,262,060.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO		180,000,000.00	17,124,900,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162.972,934,000.00		283,004,259,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.845,893,000.00		17,885,011,705.00
6	SATPOL PP			116,194,750.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			153,290,200.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			1,653,462,852.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	778,000,000.00	-	8,388,124,400.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100,170,000.00		2,657,343,400.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			50,000,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			114,944,400.00
13	DINAS PERHUBUNGAN			11,906,525,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		12,000,000.00	967,465,000.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			1,241,829,335.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			429,200,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		98,580,000.00	275,880,000.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		60,000,000.00	1,772,879,220.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		76,495,000.00	15,546,710,920.00
20	SETDA	200,100,000.00	49,825,000.00	2,126,758,417.00
21	SEKRETARIAT DPRD			211,784,200.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			195,060,000.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			763,430,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			10,000,000.00
25	INSPEKTORAT			133,200,000.00
26	KECAMATAN REMBANG	278,464,866.00		1,392,414,566.00
27	KECAMATAN KALIORI			56,000,000.00
28	KECAMATAN SULANG			-
29	KECAMATAN SUMBER	50,000,000.00		50,000,000.00
30	KECAMATAN BULU			-
31	KECAMATAN LASEM			37,825,000.00
32	KECAMATAN PANCUR			29,870,520.00
33	KECAMATAN SLUKE			271,442,068.00
34	KECAMATAN PAMOTAN			38,650,000.00
35	KECAMATAN GUNEM			200,000,000.00
36	KECAMATAN SALE			12,000,000.00
37	KECAMATAN KRAGAN			20,000,000.00
38	KECAMATAN SEDAN			78,000,000.00
39	KECAMATAN SARANG			170,000,000.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			228,714,160.00
	JUMLAH	174,625,561,866.00	721,900,000.00	448,592,319,699.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN		
		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
			Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
2	DINAS KESEHATAN			
3	RSUD dr. R.SOETRASNO			
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
6	SATPOL PP			
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
13	DINAS PERHUBUNGAN			
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA			
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
20	SETDA			
21	SEKRETARIAT DPRD			
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6,100,000,000.00	10,391,229,000.00	403,569,026,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
25	INSPEKTORAT			
26	KECAMATAN REMBANG			
27	KECAMATAN KALIORI			
28	KECAMATAN SULANG			
29	KECAMATAN SUMBER			
30	KECAMATAN BULU			
31	KECAMATAN LASEM			
32	KECAMATAN PANCUR			
33	KECAMATAN SLUKE			
34	KECAMATAN PAMOTAN			
35	KECAMATAN GJNEM			
36	KECAMATAN SALE			
37	KECAMATAN KRAGAN			
38	KECAMATAN SEDAN			
39	KECAMATAN SARANG			
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	JUMLAH	6,100,000,000.00	10,391,229,000.00	403,569,026,000.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	PEMBAHASAN	
		Jumlah Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	582,501,005,539.00
2	DINAS KESEHATAN	-	177,433,234,200.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	168,449,064,500.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	298,286,188,600.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	31,689,734,000.00
6	SATPOL PP	-	9,070,663,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	6,361,830,000.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	22,381,866,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	74,568,293,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	19,310,418,200.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	5,515,597,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	12,296,434,600.00
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	29,924,641,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	7,709,528,400.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	10,662,481,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	14,561,344,000.00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	4,372,582,525.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	18,585,370,200.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	33,692,092,000.00
20	SETDA	-	75,112,410,600.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	63,379,425,700.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	6,567,404,800.00
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	413,960,255,000.00	454,495,622,412.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	10,730,297,600.00
25	INSPEKTORAT	-	9,558,371,000.00
26	KECAMATAN REMBANG	-	10,478,665,175.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	2,782,676,725.00
28	KECAMATAN SULANG	-	2,736,353,925.00
29	KECAMATAN SUMBER	-	2,566,256,425.00
30	KECAMATAN BULU	-	2,228,152,775.00
31	KECAMATAN LASEM	-	2,912,215,200.00
32	KECAMATAN PANCUR	-	2,706,540,125.00
33	KECAMATAN SLUKE	-	3,744,982,500.00
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	2,512,962,150.00
35	KECAMATAN GUNEM	-	2,234,319,875.00
36	KECAMATAN SALE	-	2,281,021,700.00
37	KECAMATAN KRAGAN	-	2,741,121,350.00
38	KECAMATAN SEDAN	-	2,653,445,750.00
39	KECAMATAN SARANG	-	3,078,909,500.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	10,228,783,000.00
	JUMLAH	413,960,255,000.00	2,203,102,306,051.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		Belanja Operasi		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(15,700,000.00)	(393,763,000.00)	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97,100,000.00	(12,100,000.00)	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(6,040,000.00)	(113,960,000.00)	-
6	SATPOL PP	4,980,000.00	292,120,000.00	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	680,000.00	(680,000.00)	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(4,995,000.00)	274,195,000.00	-
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(10,965,000.00)	987,594,000.00	-
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(795,000.00)	-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	(1,900,000.00)	(4,100,000.00)	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(3,250,000.00)	22,325,000.00	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	(7,260,000.00)	1,665,000.00	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(9,965,000.00)	1,640,000.00	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,475,000.00	530,525,000.00	-
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(1,530,000.00)	(688,470,000.00)	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3,620,000.00	(2,200,000.00)	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,700,000.00	531,300,000.00	-
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	(125,000.00)	(39,875,000.00)	-
20	SETDA	(11,645,000.00)	254,345,000.00	-
21	SEKRETARIAT DPRD	3,100,000.00	2,917,319,800.00	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,300,000.00	112,000,000.00	-
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	9,360,000.00	(83,824,866.00)	-
27	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
28	KECAMATAN SULANG	(570,000.00)	570,000.00	-
29	KECAMATAN SUMBER	(360,000.00)	360,000.00	-
30	KECAMATAN BULU	-	-	-
31	KECAMATAN LASEM	(1,325,000.00)	-	-
32	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	(5,490,000.00)	5,500,000.00	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	(3,395,000.00)	(97,655,002.00)	-
38	KECAMATAN SEDAN	-	-	-
39	KECAMATAN SARANG	-	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11,690,000.00	860,110,600.00	-
	JUMLAH	60,490,000.00	5,354,146,532.00	-

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		Belanja Operasi		
		Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Jumlah Belanja Operasi
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	610,000,000.00	(3,170,000,000.00)	(2,969,463,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	85,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	(200,000,000.00)	(320,000,000.00)
6	SATPOL PP	-	-	297,100,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	15,000,000.00	-	284,200,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(1,064,500,000.00)	-	(87,871,000.00)
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	(795,000.00)
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	(6,000,000.00)
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	19,075,000.00
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	(5,595,000.00)
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	(8,325,000.00)
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	535,000,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(15,000,000.00)	-	(705,000,000.00)
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	1,420,000.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	305,000,000.00	-	845,000,000.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	(40,000,000.00)
20	SETDA	210,000,000.00	-	452,700,000.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	-	2,920,419,800.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	113,300,000.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	-	-	(74,464,866.00)
27	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
28	KECAMATAN SULANG	-	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	-	-	-
30	KECAMATAN BULU	-	-	-
31	KECAMATAN LASEM	-	-	(1,325,000.00)
32	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	-	-	10,000.00
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	-	-	(101,050,002.00)
38	KECAMATAN SEDAN	-	-	-
39	KECAMATAN SARANG	-	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(200,000,000.00)	-	671,800,600.00
	JUMLAH	(139,500,000.00)	(3,370,000,000.00)	1,905,136,532.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		Belanja Modal		
		Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	26,452,850,000.00	(25,573,387,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	100,000,000.00	200,000,000.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	500,000,000.00
6	SATPOL PP	-	(10,000,000.00)	47,900,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	10,800,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	372,971,000.00	1,900,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(259,205,000.00)	-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	6,000,000.00	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(9,075,000.00)	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	5,595,000.00	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	8,325,000.00	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	200,000,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	40,000,000.00	(360,000,000.00)
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-
20	SETDA	-	7,200,000.00	-
21	SEKRETARIAT DPRD	-	29,304,200.00	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	(13,300,000.00)	-
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	-	-	50,000,000.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
28	KECAMATAN SULANG	-	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	-	-	-
30	KECAMATAN BULU	-	-	-
31	KECAMATAN LASEM	-	1,325,000.00	-
32	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	-	-	(10,000.00)
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	-	(94,949,998.00)	(104,000,000.00)
38	KECAMATAN SEDAN	-	70,000,000.00	-
39	KECAMATAN SARANG	-	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	61,199,400.00	-
	JUMLAH	-	26,768,239,602.00	(25,026,797,000.00)

Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		Belanja Modal		
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Jumlah Belanja Modal
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(5,000,000.00)	139,000,000.00	1,013,463,000.00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	300,000,000.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10,110,000,000.00	-	10,110,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(480,000,000.00)	-	20,000,000.00
6	SATPOL PP	-	-	37,900,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	10,800,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	374,871,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	(259,205,000.00)
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	6,000,000.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	(9,075,000.00)
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	5,595,000.00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	8,325,000.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	200,000,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	98,580,000.00	98,580,000.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	(320,000,000.00)
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-
20	SETDA	200,100,000.00	-	207,300,000.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	-	29,304,200.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	(13,300,000.00)
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	74,464,866.00	-	124,464,866.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
28	KECAMATAN SULANG	-	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	-	-	-
30	KECAMATAN BULU	-	-	-
31	KECAMATAN LASEM	-	-	1,325,000.00
32	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	-	-	(10,000.00)
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	-	-	(198,949,998.00)
38	KECAMATAN SEDAN	-	-	70,000,000.00
39	KECAMATAN SARANG	-	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	61,199,400.00
	JUMLAH	9,899,564,866.00	237,580,000.00	11,878,587,468.00

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
			Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-
6	SATPOL PP	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	(365,000,000.00)
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-
20	SETDA	-	-	-
21	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	(255,000,000.00)
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	-	-	-
27	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
28	KECAMATAN SULANG	-	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	-	-	-
30	KECAMATAN BULU	-	-	-
31	KECAMATAN LASEM	-	-	-
32	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	-	-	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-
38	KECAMATAN SEDAN	-	-	-
39	KECAMATAN SARANG	-	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
	JUMLAH	-	-	(620,000,000.00)

**Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Jumlah Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	(1,956,000,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	300,000,000.00
3	RSUD dr. R.SOETRASNO	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	10,195,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	(300,000,000.00)
6	SATPOL PP	-	335,000,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	295,000,000.00
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	287,000,000.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	(260,000,000.00)
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(365,000,000.00)	(355,000,000.00)
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	735,000,000.00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	(705,000,000.00)
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	100,000,000.00
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	525,000,000.00
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	(40,000,000.00)
20	SETDA	-	660,000,000.00
21	SEKRETARIAT DPRD	-	2,949,724,000.00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(255,000,000.00)	(155,000,000.00)
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-
25	INSPEKTORAT	-	-
26	KECAMATAN REMBANG	-	50,000,000.00
27	KECAMATAN KALIORI	-	-
28	KECAMATAN SULANG	-	-
29	KECAMATAN SUMBER	-	-
30	KECAMATAN BULU	-	-
31	KECAMATAN LASEM	-	-
32	KECAMATAN PANCUR	-	-
33	KECAMATAN SLUKE	-	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	-	-
35	KECAMATAN GUNEM	-	-
36	KECAMATAN SALE	-	-
37	KECAMATAN KRAGAN	-	(300,000,000.00)
38	KECAMATAN SEDAN	-	70,000,000.00
39	KECAMATAN SARANG	-	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	733,000,000.00
	JUMLAH	(620,000,000.00)	13,163,724,000.00

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Pembahasan	
			Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN	315,422,302,051.00	328,586,026,051.00	13,163,724,000.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	372,290,670,051.00	385,454,394,051.00	13,163,724,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122,290,670,051.00	135,454,394,051.00	13,163,724,000.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	372,290,670,051.00	385,454,394,051.00	13,163,724,000.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56,868,368,000.00	56,868,368,000.00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	53,868,368,000.00	53,868,368,000.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	56,868,368,000.00	56,868,368,000.00	-
	Pembiayaan Netto :	315,422,302,051.00	328,586,026,051.00	13,163,724,000.00

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 Nopember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

H.SUPADI

Drs. DRUPODO, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Sesuai dengan aslinya
PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG
Kepala Badan Kesbangpol Kab. Rembang



Drs. DRUPODO, M. Si

Pembina Utama muda

NIP. 19670421 199303 1 009

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2022



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SELASA , 30 Nopember 2021

Dibacakan oleh : H. SUNARDI,SPd.i.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

R E M B A N G

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2022

Senin , 30 Nopember 2021

Dibacakan oleh : H. SUNARDI , S.Pdi

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la asyrofil ambiyai wal mursalin ,
Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati , Asisten Sekda dan para Kepala OPD di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf , Dan ...

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini , terlebih dahulu marilah kita tak henti-hentinya , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI , atas segala limpahan Rohmat , Nikmat , Taufik dan HidayahNYA , yang dikaruniakan pada kita , sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat , dan seluruh keluarganya..., Amiin...

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati , serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Pada kesempatan yang baik ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , yang pertama mengucapkan “ Selamat Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 50 tanggal 29 November 2021 “ semoga selalu semangat dalam Berkarya, dan selalu meningkatkan kinerja , untuk mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Masyarakat.

Kedua , kami juga mengucapkan “ Selamat Hari Guru Nasional “ tanggal 25 Nopember 2021 , semoga atas kesabaran dan keikhlasan para Guru, dalam menjalankan tugasnya untuk berbakti dalam mencerdaskan bangsa ini , akan menghasilkan munculnya generasi penerus bangsa yang berkualitas , amanah dan berachlakul karimah, untuk terus melanjutkan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

Sidang dewan yang kami hormati

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir kami , terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, setelah kami mendapat jawaban dan penjelasan yang cukup panjang lebar dari Sdr. Bupati , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , yang disampaikan dalam rapat paripurna ke I , hari Selasa , tanggal 23 Nopember 2021 yang lalu , Kami menyampaikan banyak terimakasih dan apresiasi atas jawaban dan semua penjelasannya.

Selanjutnya kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , yang pertama , memberikan apresiasi kepada TAPD , atas kinerjanya yang telah bekerja keras , untuk menyelesaikan penyusunan Raperda APBD tahun Anggaran 2022 ini , sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi , kepada semua pimpinan dan anggota Banggar , TAPD dan kepada OPD terkait , yang

telah bersama-sama melakukan pembahasan Raperda APBD Tahun 2022 ini dengan saksama , dalam waktu telah yang dijadwalkan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....

Setelah kami melakukan pengkajian , telaah dan pencermatan yang cukup , dari hasil laporan Banggar , atas pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 ini , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , dengan mengucap ***Bismillahirrohmanirrohim menerima dan menyetujui , Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, untuk dijadikan Perda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022*** , dengan segala perubahan yang terjadi , baik pengurangan , penambahan dan pergeseran di dalam pembahasannya.

Di dalam pendapat ahir ini , ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti , antara lain sebagai berikut :

1. Setelah Perda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini disahkan , mohon agar pedoman dasar hukum yang belum ada , yakni harus diterbitkannya Perkada/Perbup , demi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, mohon agar pihak excutif segera untuk menerbitkan Perkada/Perbup yang dibutuhkan.
2. Terkait dengan kegiatan sarana dan prasarana fisik, yang membutuhkan kegiatan perencanaan jasa konsultan , mohon agar pelaksanaan kegiatan dimaksud , dapat dimulai dari awal dalam tahun anggaran berjalan atau paling lambat pada ahir triwulan pertama , supaya tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan , dan progress penyerapan anggaran juga sesuai dengan yang direncanakan.
3. Terkait Tentang penyusunan DPA , yang menurut pengertian kami , kepala OPD sebagai pengguna anggaran , sudah mempersiapkan dari awal tahun , dimulai sejak Perda APBD disahkan , namun dari kenyataan yang ada , OPD yang tidak segera memulai kegiatan pekerjaan , bila ditanya jawabnya menunggu DPA belum turun , Maka sehubungan dengan hal tersebut , kami mohon agar DPA dimaksud sudah siap dilaksanakan pada awal tahun anggaran berjalan.
4. Mengingat saat ini sudah mulai masuk musim hujan , dan melihat diwilayah kita banyak kegiatan pengusaha pengelola tambang , seperti tambang pasir kwarsa , batu kalsit , juga batu andesit atau tambang lainnya , kami mohon agar sdr. Bupati memerintahkan kepada OPD terkait , untuk segera melakukan tindakan langkah antisipasi terhadap terjadinya bencana dimusim penghujan , baik bencana tanah longsor ataupun banjir.

Sidang Dewan yang kami Hormati ...,

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini , semoga apa yang kita upayakan mandapatkan hasil yang maksimal , untuk kepentingan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatiannya , dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Wallahul Muwafik Ilaa aqwamithooriq.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 30 Nopember 2021

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

MUNTHOHID , SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI ,SPd.I



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN 2022
Disampaikan oleh.....

Assalamualaikum, wr.wb.

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati, Para Anggota Forkom Pimda Kabupaten Rembang,
Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI, Ketua Pengadilan Negeri dan
Kejaksaan Negeri Kab. Rembang.

Yang kami hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Rembang, beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati, Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta
Para Camat Se- Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati, Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan
Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang
berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kab. Rembang dengan agenda penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi atas RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN 2022 dalam Keadaan Sehat Wal'afiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amiin !!

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati.

Demi menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yang berkualitas dan benar-benar berpihak kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Rembang dan TAPD dan OPD-OPD Pemkab Rembang telah melakukan rapat rapat dalam rangka membahas Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Seluruh rangkaian rapat yang telah diselenggarakan. Dilaksanakan dalam bingkai semangat kemitraan dan persaudaraan. Kesungguhan DPRD dan seluruh jajaran eksekutif selama masa-masa rapat ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam dan sungguh melelahkan, diskusi yang serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis-konstruktif, baik dalam rapat kerja komisi, maupun dalam rapat Badan Anggaran. Oleh karena itu FPKB menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan telah menunjukkan komitmen kemitraan selama masa rapat ini.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati.

Setelah mendengarkan laporan Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, FPKB memandang perlu untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Seluruh hasil pembahasan termasuk beberapa pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran program-program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ,FPKB berharap agar semua OPD sebagai pengelola anggaran bersungguh-sungguh dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap maksimal dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Rembang.

2. Belajar dari realisasi program dan kegiatan pada APBD TA. 2021 yang cukup lamban dan banyak menumpuk di akhir tahun anggaran, FPKB berharap Pemkab. Rembang melakukan evaluasi dan selanjutnya menyusun strategi percepatan penyerapan APBD TA. 2022 dan mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan APBD TA. 2022 sedini mungkin. Kendala-kendala penyerapan APBD harus diantisipasi dan disiapkan solusi-solusi. Hal ini penting karena percepatan penyerapan APBD berkorelasi langsung dengan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi dampak Covid-19 juga masih cukup terasa, sehingga optimalisasi realisasi APBD 2022 diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat Rembang guna mendukung percepatan pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Terkait Hibah dan Bansos, FPKB meminta Pemkab. Rembang menyederhanakan prosedur dan syarat-syarat pencairan untuk mempermudah masyarakat penerima dalam mengurus pencairan dan bantuan. Kami mencermati, proses pencairan hibah-bansos dari Pemerintah Pusat dan Provinsi bias dilakukan dengan cukup satu kali pertemuan, sekalilagi cukup satu kali pertemuan antara pihak penerima dengan pihak kantor kementerian atau OPD, tapi proses pencairan bantuan di Kab. Rembang memerlukan kehadiran penerima berkali-kali ke kantor OPD pengampu. Bahkan terkadang hanya untuk mengurus bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- perlu bolak-balik ke kantor OPD sampai 4-5 kali. FPKB lebih menekankan pengawasan pelaksanaan hibah-bansos, sehingga pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
4. Terkait program wajib dan kegiatan prioritas yang belum teranggarkan penuh dalam APBD murni 2022 dan direncanakan untuk dipenuhi di Perubahan APBD 2022, FPKB menekankan kepada Pemkab. Rembang agar berkomitmen untuk memenuhinya. Terutama anggaran yang berkaitan dengan gaji pegawai dan dana insentif yang diperuntukkan untuk guru Madin, Guru TPQ, perawat jenazah dan kegiatan prioritas lainnya.

5. FPKB meminta kepada Pemkab. Rembang untuk mengkaji dan mengupayakan pemberian honor atau insentif untuk guru-guru di sekolah dan madrasah formal atau swasta yang dulu pernah dianggarkan dalam APBD, namun dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak dianggarkan lagi. Hal ini penting untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka yang telah andil dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati.

beberapa catatan yang kami sampaikan dan selanjutnya, dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*”, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat

MENERIMA dan MENYETUJUI Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022.

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya .

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamittorieq

Wasalammu'allaikumWr. Wb.

Rembang, 30 November 2021

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN REMBANG



ILYAS

Ketua



NASIRUDIN, S.Si

sekretaris



PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Sekretaris Dewan Kabupaten Rembang;
Yth. Para Tokoh Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan ridhoNya sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian **"Pendapat Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022"** dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Fraksi NasDem akan menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan Pendapat Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Kami berharap pengelolaan APBD Tahun 2022 dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Kami mendukung Raperda APBD Tahun 2022 untuk disahkan menjadi Perda karena hal ini mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rembang.
3. Kami **menerima dan menyetujui** Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Perda.

Demikian pendapat fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 November 2021
a.n. Ketua

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



SUSTIYONO
Anggota



PDI PERJUANGAN

**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212
Telp. : (0295)6911494



**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang terhormat. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,
Yang terhormat. Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,
Yang terhormat. Sekretaris Daerah dan seluruh Jajaran Eksekutif,
dan Seluruh Anggota Dewan, beserta Seluruh Hadirin Yang Kami Muliakan.

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Om Swasti astu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu,

MERDEKA!

Mengawali Pendapat Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Sdr. Bupati, Wakil Bupati dan Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpinan Rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi.

Berikut kami juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepada seluruh Anggota Badan Anggaran bersama TAPD, yang telah berkerja dengan baik untuk menyelesaikan Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Semoga nantinya dapat menjadi Peraturan Daerah yang berkualitas serta bermanfaat untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Rembang di Tahun 2022

Menanggapi hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2022. Kami Fraksi PDI Perjuangan dengan mengucap ***“Bismillahirromanirrohim”***, ***menerima dan menyetujui*** Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, dengan beberapa catatan :

- Kami menilai pembahasan APBD ditahun ini kurang cukup waktu, sehingga pembahasannya terkesan tergesa-gesa. Harapan kami, karena seluruh kegiatan sudah terinput dalam sistem perencanaan pada SIPD tahun lalu, maka kegiatan-kegiatan tersebut dapat segera dijalankan pada triwulan pertama. Ini dapat menjadi evaluasi kita bersama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, sehingga tahun – tahun selanjutnya dapat dipersiapkan secara lebih matang untuk menghasilkan Peraturan Daerah APBD yang lebih baik dan berkualitas.

- Kami melihat bahwa serapan anggaran kita masih terbilang rendah, maka kami mendorong supaya Pemerintah kabupaten berusaha dengan optimal agar serapan anggaran kita naik/ lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
- PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Rembang menurut kami masih bisa ditingkatkan, utamanya melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan harus lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan daerah yang ada di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlidungan untuk kita semua. Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua


JASMANI



Sekretaris


WIDODO, SH

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2022**



**FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

REMBANG, 30 NOVEMBER 2021

DIBACAKAN OLEH : H. NUR HASAN SH.MH

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2022**



**FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

REMBANG, 30 NOVEMBER 2021

DIBACAKAN OLEH : H. NUR HASAN SH.MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT-HANURA

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT HANURA

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

SELASA, 30 NOVEMBER 2021

DIBACAKAN OLEH : H. NUR HASAN SH.MH

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Selamatsiangdan Salam Sejahtera bagikitasemua.

yang kami Hormati

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang;
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
5. Staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
6. Saudara Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff;
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini perkenankan kami menyampaikan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, Taufiq dan hidayahNya sehingga sampai saat ini kita semua di beri kenikmatan hidup dan dalam keadaan sehat sehingga kita bias mengikuti rapat paripura dewan yang terhormat ini dengan baik.

Kami Fraksi Demokrat – Hanura mengucapkan Selamat Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November kemarin semoga kedepan kualitas para Guru semakin baik sehingga Putra Putri kita semakin pintar dan cerdas untuk membangun Indonesia yang kuat dan maju.

Guru memang tidak ada yang hebat tetapi banyak anak bangsa yang hebat berkat Guru. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan hari KORPRI kami member apresiasi atas semangat kepada KORPRI atas pengabdianya semoga Pengabdian dan Pelayanannya bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Kami Fraksi Demokrat – Hanura memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota Badan Anggaran dan TAPD yang telah bekerja dengan baik dalam menyelesaikan pembahasan Raperda ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang 2022 ini yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan mendalam bersama Badan Anggaran dan TAPD, Kami Fraksi Demokrat – Hanura dengan mengucap bismillahirrohmanirrohiim kami dapat menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan dan di sahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Untuk pendapat akhir Fraksi Demokrat – Hanura kali ini kami menyampaikan bahwa kami tidak bisa menyampaikan pendapat, saran, masukan untuk perbaikan kedepan karena kami anggap Pemerintah Kabupaten Rembang sudah ahli mengelola Anggaran dan kami tidak mau dikatakan memfitnah Pemerintah Kabupaten Rembang, biarlah DPRD sebagai lembaga pendiam dan terdiam walaupun ada permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Rembang.

Cukup sekian dan terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 November 2021

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

MUGIARTO S.T.



SEKRETARIS

DUMADIYONO, S.H.

PENDAPAT

FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG TA. 2022

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG

HARI SELASA TGL. 30 NOPEMBER 2021

JURU BICARA : WIWIN WINARTO, S.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan TAPD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sampai saat ini Allah SWT telah melimpahkan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan kepada kita semua. Karena itu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat-NYA seraya mohon agar kita selalu diberi keimanan dan kekuatan agar kedepan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun KORPRI yang ke-50 pada tanggal 29 Nopember kemarin. Kami menyampaikan apresiasi atas semangat anggota KORPRI yang di tengah situasi pandemi saat ini tetap menjalankan tugas pengabdian. Semoga pengabdian dan pelayanannya bermanfaat bagi seluruh bangsa dan negara.

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ibarat aliran darah dalam tubuh manusia, ia menentukan kuat lemahnya seseorang, menentukan sehat sakitnya manusia, menentukan keseimbangan jiwa dan raga seseorang, bahkan menentukan hidup matinya manusia.

Sedang Pemerintah Daerah bersama DPRD ibarat jantung yang mengolah dan memompakan darah keseluruhan tubuh. Maka bila terjadi gangguan dalam peredaran darah, seseorang akan sakit dan tidak bisa beraktivitas. Disinilah letak pentingnya sinergitas antara PEMDA dengan DPRD.

Setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, sampailah saatnya Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyampaikan pendapat terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan beberapa hal yang dihadapi Kabupaten Rembang di tahun 2022 mendatang, sebagai berikut:

1. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, hendaknya Pemkab harus benar-benar cermat dalam menentukan prioritas belanja, agar prinsip kemanfaatan dan kesejahteraan dapat terpenuhi.
2. Pemkab harus fokus pada apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, agar visi Rembang Gemilang dapat segera diwujudkan.
3. Adanya rencana pinjaman dalam rangka pemenuhan proyek strategis nasional, Pemkab harus benar-benar menghitung agar semua kewajiban atas pinjaman, tidak menambah beban anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu jalannya pembangunan.
4. Fraksi KIS mengingatkan kepada Bupati Rembang, agar paling lambat tahun 2021 ini. Bisa membuat Peraturan yang mengatur penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) sebagai pengganti IMB, yang telah dihapus oleh Pemerintah sesuai PP No 16 Tahun 2021. Hal ini sangat penting untuk memberikan pelayanan masyarakat, untuk pengendalian bangunan dan gedung sesuai aturan serta menambah PAD Kabupaten Rembang.

5. Fraksi KIS meminta Pemkab. Rembang ditahun 2022 sudah merencanakan Anggaran Pembebasan Lahan untuk Embung Trenggulun, agar Tahun 2023 realisasinya bisa dilaksanakan. Begitu pula dengan Embung Pasedan di Tahun 2024 juga sudah telaksana pembebasan lahannya, karena itu merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Selain itu juga perlu dianggarkan study LARAF (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) sebagai dasar Pembangunan Embung tersebut.
6. Dengan Anggaran yang cukup besar di Tahun 2022 mendatang karena didukung Pinjaman Daerah sebesar 200 M. Kami meminta agar infrastuktur di Kabupaten Rembang bisa tertata dengan baik, kualitas bangunannya harus diperhatikan, agar umur bangunan bisa lebih lama dan tidak mudah rusak. Kami mendambakan Kota Rembang menjadi kota yang maju, dengan jalan yang kualitasnya bagus dan lebar. Dukungan Anggaran tahun 2022 mendatang sangatlah besar, baik itu untuk Pembangunan Jalan, Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan maupun Anggaran untuk Pemeliharaan Jalan.

Sdr. Bupati dan hadirin yang berbahagia,

Itulah pendapat fraksi kami, seraya menyebut “Alhamdulillah robbil ‘alamiin” Fraksi Karya Indonesia Sejahtera **menyetujui**, ditetapkannya Raperda ini menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian pendapat fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Aamiin.

Rahayu ingkang sami pinanggih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,



AGUS SUTRISNO

Sekretaris,



PUJI SANTOSA, S.P. M.H.



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA PENANDATANGANAN
PERSETUJUAN BERSAMA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Rembang, 30 November 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - ~~Wakil Bupati Rembang ;~~
- Ykh. - Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang ;
- Ykh. - Para hadirin yang berbahagia;

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna **“Penandatanganan Persetujuan Bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022”**, dalam keadaan sehat wal’fiat.

Kami sampaikan **“terima kasih”** kepada semua pihak, terutama jajaran DPRD yang telah mendukung dan mencurahkan perhatian dengan semangat yang tinggi membahas hingga selesainya proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sehingga berjalan lancar dan tepat waktu.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk mensinkronkan program dan kegiatan baru yang berkaitan dengan dana transfer pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat menginstruksikan setiap daerah melakukan sinergitas anggarannya dalam upaya penanganan dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Sehingga harus memprioritaskan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial dalam menangani dampak pandemi COVID-19.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 ini, telah dilakukan konsolidasi dalam penyusunan capaian program dan kegiatan serta penyesuaian pada setiap program yang akan dilaksanakan nantinya

dapat memberikan *output* dan *outcome* dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur.

Pada APBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 difokuskan pada tujuh rencana program yaitu :

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing;
3. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan ketersediaan air baku;
5. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
6. Peningkatan Kemandirian Desa;
7. Penurunan Ancaman Krisis akibat Perubahan Iklim dan Penyakit Menular (Wabah, *Epidemic*, dan *Pandemic*).

Dengan demikian melalui APBD Tahun Anggaran 2022 ini diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung aspirasi berbagai program dan kegiatan yang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan anggaran ini diharapkan dapat menyelaraskan dengan Kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat, baik kegiatan yang bersifat keharusan dan instruksional.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman dan rujukan kebijakan kita pada tahun 2022 dalam melaksanakan aktivitas pemerintah dan pembangunan Kabupaten Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya tetap optimis bahwa kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan perekonomian demi

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.874.516.280.000,- (*Satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya untuk Rancangan Anggaran Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.203.102.306.051,- (*Dua triliun dua ratus tiga milyar seratus dua juta tiga ratus enam ribu lima puluh satu rupiah*)

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat defisit sebesar (Rp.328.586.026.051,-) (*Tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima puluh satu rupiah*), ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp.328.586.026.051,- (*Tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu lima puluh satu rupiah*), sehingga pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi *balance*.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Melalui rapat Paripurna ini pula, sekali lagi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan **terima kasih** kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh Pimpinan OPD beserta staf yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah daerah, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Aamiin, Aamiin, Ya Robbal 'Alamiin.*
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 15 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk Hukum berbentuk peraturan daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan skala prioritas rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Propemperda sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



SUPADI

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
 Nomor :
 Tanggal : 30 November 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	LAMA		NA	Penjelasan atau Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perda	Revisi RTRW Kab. Rembang Tahun 2011-2031	Tujuan, kebijakan dan strategi enataan rencana struktur ruang, rencanapolaruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang	V	V	Tahun 2022	V		1. DPU TARU 2. BAPPEDA 3. DINTANPAN 4. DLH 5. BAG. HUKUM 6. BAG. PEMERINTAH AN	2021-2022	
2.	Perda	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD PD. BPR BKK Lasem, PD BKK Kalioridan PT. Bank Jateng	Perubahan jumlah nilai penyertaan modal yang disertakan modal yang pada BUMD antarlain PT. BPR BKK Lasem (Perseroda), PT. BPR Bank Rembang (Perseroda), Perumda Air Minum Banyumilikab. Rembang, PT. Rembang Sejahtera Jaya, PT. Rembang Migas Energi, Aneka Perusda Kab. Rembang	V	V	Tahun 2022		Perubahan Perda	1. BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA 2. BPPKAD 3. BAG. HUKUM 4. BUMD	Tahun 2022	

3.	Perda	Budaya Integritas	<p>a. Kajian teoritik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi Integritas - Pengembangan Budaya Integritas - Dasar Hukum dan Paradigma dan Praktik empiris <p>b. Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internalisasi Integritas - Procs - Pembangunan Integritas - Proses Penyelarasan 	V	Tahun2022	V		Semua OPD	Tahun 2022
4.	Perda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip, maksud dan tujuan 2. Ruang lingkup 3. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penyandang disabilitas 4. Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 5. Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Pekerjaan - Pelatihan kerja - Penempatan tenaga kerja - Perluasan - Penerimaan tenaga kerja - Upah dan kontrak kerja - Fasilitas kerja 	V	Tahun2022	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. DINSOS PPKB 2. BAPPEDA 3. DINPERMA DES 4. DKK 5. DINDIKPO RA 6. DPKP 7. DPMPSPN AKER 8. DINBUDDPA R 9. BPBD 10. DININDAG KOP UKM 11. KEMENTE RIAN AGAMA 	Tahun 2022

- Pengawasan kerja
- Kesehatan
- Upaya pelayanan kesehatan
- Fasilitas pelayanan kesehatan
- Kesehatan reproduksi
- Jaminan kesehatan
- Sosial
- Seni dan budaya
- Olahraga
- Pemberitaan
- Sipil politik
- Hukum
- Penanggulangan bencana
- Pra bencana
- Tanggap darurat
- Pasca bencana
- Tempat tinggal
- 6. Aksesibilitas
- 7. Partisipasi masyarakat
- 8. Pengarusutamaan penyandang disabilitas
- 9. Penghargaan
- 10. Pembiayaan
- 11. Komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- 12. Saksi admintarsi
- 13. Ketentuan penyidikan
- 14. Ketentuan pidana
- 15. Ketentuan peralihan
- 16. Ketentuan penutup

5.	Perda	Pedoman Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite <ul style="list-style-type: none"> - Perbup pedoman pelaksanaan PUG - Surat Edaran Bupati 2. Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum, isu gender, dalam prioritas daerah - Isu gender dalam prioritas daerah - Visi misi 3. Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Pokja PUG Kabupaten - Tim teknis pengarusutamaan gender - Focal point PUG Kabupaten - Focal point PUG Kecamatan - Pokja PUG Desa 4. Sumber daya manusia dan anggaran <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan yang terlatih PPRG - Anggaran kelembagaan PUG 5. Data, sistem informasi KIE 6. Pedoman dan metode 7. Peran serta masyarakat 8. Pelaksanaan 9. Partisipasi <ul style="list-style-type: none"> - Dunia usaha - Media masa 	V	Tahun 2022	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA 2. DINSOS PPKB 3. BPPKAD 4. INSPEKTORAT 5. DINPERMAD ES 6. BAG.ORGANISASI 	Tahun 2022	
----	-------	---	--	---	------------	---	---	------------	--

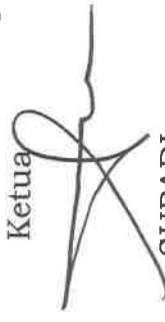
6.	Perda	Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan barang milik daerah		V	Tahun 2022		V	BPPKAD	Tahun 2022
7.	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	<p>Program pembangunan industri dalam jangka waktu 20 tahun kedepan</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan kabupaten 2. Pengembangan perwilayah 3. Pembangunan sumberdaya industri 4. Pembangunan sarana dan prasarana industri 5. Pemberdayaan industri <p>Sarana kuantitatif pembangunan sektor industri pada akhir tahun ditetapkan dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan produksi sector industri 2. Kontribusi industri Non Migas terhadap PDRB 3. Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor 4. Jumlah tenaga kerja sector industri 	V		Tahun 2022	V	Masih dalam proses	<p>1. Dinindagkop UKM</p> <p>2. DPRD</p> <p>3. Bag. Hukum</p> <p>4. BAPPEDA</p> <p>5. DPU Taru</p> <p>6. Dilnutkan</p> <p>7. Dintanpan</p> <p>8. Dinbudpar</p>	Tahun 2022

13.	Perda Inisiatif	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat	<p>a. Pencegahan Penyakit masyarakat</p> <p>b. Rehabilitasi Penyakit</p>	V	Triwulan Tahun 2022	V	Pencegahan Rehabilitasi dan penanggulangan penyakit masyarakat	1. Dinsos PPKB 2. Satpol PP 3. MUI	yang lain. Hal ini telah diatur dalam UU 18/2019 tentang Pesantren.	membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktifitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan Metodologi Penjaminan mutu. Undang-Undang 'tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independen sipenyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan Pesantren.
-----	-----------------	---	--	---	---------------------	---	--	--	---	--

			<p>Masyarakat; dan c. Penanggulangan Penyakit Masyarakat.</p>			<p>perlu dilakukan bukan hanya bersifat refresif tapi perlu penanganan pencegahan agar Pekat tidak berkembang pesat namun perlu upaya rehabilitasi baik secara mental maupun material sehingga korban tidak mengulang kembali.</p>	<p>4. Bag. Kesra</p>							<p>mengatur Rehabilitasi Sosial yang diatur pada pasal 8 (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan intervensi pekerja sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.</p> <p>(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara :</p> <p>a. persuasif, motivatif, dan koersif psikologis; b. Perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan fisik</p>
--	--	--	---	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	---

												<p>Memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan mengutamakan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengelolaan pemasaran permodalan sumber daya manusia dan teknologi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Ketua

 SUPADI



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 270 / 2021

NOMOR : 900 / 53 / 2021

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada Hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh* bulan November *Dua Ribu Dua Puluh Satu* kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H.M. HANIES CHOLIL BARRO** : Wakil Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan P Diponegoro No 90 Rembang yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **H. SUPADI** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **H. BISRI CHOLIL LAQOUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO , S . E** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. **RIDWAN, S.H.,M.H.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :



1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini;

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 30 November 2021


WAKIL BUPATI REMBANG

H.M. HANIES CHOLIL BARRO


KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

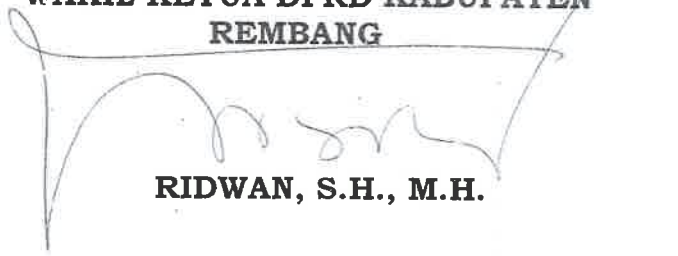
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG


H. BISRI CHOLIL LAQOUF

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG


H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG


RIDWAN, S.H., M.H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Wali Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: 1. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
2. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2022;
3. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2022.

4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua,

H. SUPADI